



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

KABUPATEN BALANGAN

2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Jln. A. Yani Km 2,5 Telp/FAX. (0526) 2029521 Paringin

Web disdik.balangkab.go.id/

Email disdikbud@balangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan telah selesai menyusun Rencana Strategis 2021-2026 yang di dalamnya terdapat sasaran dan indikator kinerja. Renstra sebagai dokumen perencanaan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi jajaran aparatur dan pranata yang berada di bawah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak-pihak pemangku kepentingan (para stakeholders) dalam membuat perencanaan pembangunan Pendidikan.

Sebagaimana diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan merupakan lembaga pelaksana kewenangan BUPATI Kabupaten Balangan dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu Renstra 2021-2026 ini tidak lain adalah sebagai tindak lanjut perencanaan pada tingkat OPD yang bertujuan mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan seperti yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, khususnya pada bidang pendidikan dan merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebab Dinas Pendidikan juga memiliki tugas untuk menyukseskan program-program nasional bidang pendidikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran agar semua kegiatan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta lebih terarah dengan adanya Renstra 2021-2026 ini.

Balangan, September 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

R I B O W O, S.Pd., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196610021990011002

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Gambaran Umum Pelayanan OPD	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya OPD.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	34
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	36
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
BAB IV Tujuan dan Sasaran	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.....	58
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	63
5.1 Strategi.....	63
5.2 Kebijakan.....	64
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	69
6.1 Program Kegiatan, Indikator....	69
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	80
BAB VIII Penutup	83

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1	Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan UPT Keadaan 2016-2021..... 19
Tabel 2.2	Komposisi Jumlah Perlengkapan..... 22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020..... 25
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan 2016-2020..... 28
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Capaian Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2020..... 31
Tabel 2.7	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020..... 32
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2020..... 32
Tabel 2.10	Capaian Indikator SPM Kesenian Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020..... 33
Tabel 2.12	Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Permasalahan Bidang Sosial Budaya..... 45
Tabel 2.13	Perumusan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026..... 50
Tabel 2.14	Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026..... 55
Tabel 2.15	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD tahun 2021-2026..... 60
Tabel 2.16	Tujuan Sasaran dan Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan..... 64
Tabel 2.17	Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan..... 65
Tabel 2.19	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Target Capaian.... 68
Tabel 2.20	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan..... 74
Tabel 2.21	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 81

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021-2026.....	11
Gambar 1.2 Grafik Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang D4/S1 Keadaan Tahun 2020.....	21
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020.....	29

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya rancangan awal Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026, yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Fungsi dan kedudukan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 beserta lampirannya;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2021-2026;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Nomor 800/ /SKT-DISDIKBUD/2021 tentang TIM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026;

Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan Pemangku kepentingan serta pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan.

1.2 Dasar Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
22. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271).

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
34. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021)
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra OPD disusun dengan maksud sebagai penjabaran dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dan dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pemenuhan SPM Pendidikan) yaitu urusan pendidikan maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2021-2026;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan periode Tahun 2021-2026;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam periode lima tahun ke depan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Terciptanya konsistensi pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara program Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan diBidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman serta tugas pokok pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

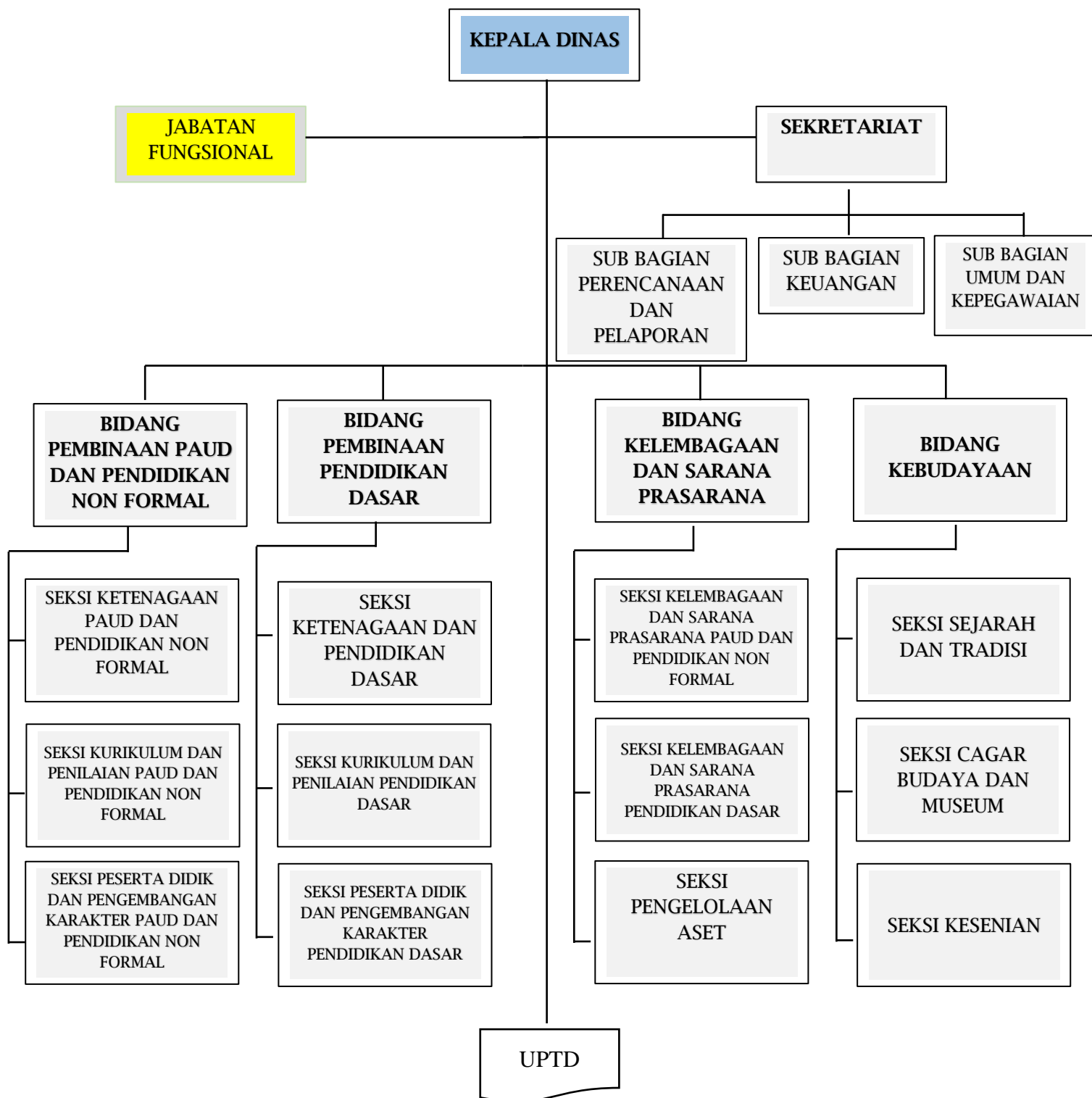
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagara budaya, dan permusesuman;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen pendidik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen pendidik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal
 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi ketenagaah Pendidikan Dasar
 2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan karakter Pendidikan Dasar
- e. Bidang Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Dasar
 3. Seksi Pengelolaan Aset
- f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Sejarah dan Tradisi
 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
 3. Seksi Kesenian
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (yang terdiri dari Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Penilik)

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2021-2026



A. BAGIAN SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

- b. *Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;*

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas.

c. *Sub Bagian Keuangan.*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.

B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan ketenagaan pendidikan dasar, kurikulum dan penilaian pendidikan dasar serta peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan ketenagaan pendidikan dasar;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kurikulum dan penilaian pendidikan dasar serta peserta didik; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

a. *Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar*

Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan ketenagaan pendidik dasar.

b. *Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar*

Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar.

c. *Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar*

Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar.

C. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan sarana prasarana paud dan pendidikan non formal, kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan sarana prasarana paud dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset.

Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari :

a. *Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi

dan supervisi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.

c. Seksi Pengelolaan Aset

Seksi Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pengelolaan aset.

D. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan PAUD dan pendidikan non formal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketenagaan PAUD dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peserta didik dan pengembangan karakter PAUD dan pendidikan non formal.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :

1. *Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pembinaan ketenagaan PAUD dan pendidikan non formal.

2. *Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pembinaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan Non Formal.

3. *Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal*

Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait peserta didik dan pengembangan karakter PAUD dan pendidikan Non Formal.

E. BIDANG KEBUDAYAAN

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sejarah dan tradisi, cagar budaya, sejarah dan museum serta kesenian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan mempunyai tugas fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sejarah dan tradisi;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian cagar budaya, sejarah dan museum; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesenian.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. *Seksi Sejarah dan Tradisi*

Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan sejarah, pelestarian

tradisi, pendaftaran budaya tak benda serta pembinaan komunitas dan lembaga adat.

2. *Seksi Cagar Budaya dan Museum*

Seksi Cagar Budaya dan Museum mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

3. *Seksi Kesenian*

Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan kesenian.

F. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan bersama-sama pembentukannya dengan Keputusan Kepala Daerah.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan sesuai keahlian atau keterampilan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional, yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.

2.2 Sumber Daya OPD

Sumber daya perangkat daerah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia

(Pegawai Disdik, Guru / Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta didik).

2. Prasarana

(Lahan, Sekolah, Ruang Kelas/Belajar, Laboratorium, Ruang Penunjang Lainnya, Fasilitas Olahraga, Musholla, Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru).

3. Sarana

(Meubelair, papan tulis, LCD, Buku Pelajaran, Bahan dan alat Praktikum, Alat Peraga, Buku Perpustakaan atau Buku Penunjang, bahan KBM lainnya, mobil dan bis angkutan pelajar, dan lain-lain);

4. Kurikulum Bahan Ajar

Sebagai acuan proses belajar mengajar (Kurikulum 2006 dan 2013, Kurikulum Muatan Lokal).

5. Dana

Dana sebagai sumber pembiayaan operasional lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan Satuan Pendidikan, dana tersedia baik dari APBD II, APBD I dan APBN berupa DAK dan Dana Transfer.

Sumber daya tersebut diatas merupakan satu kesatuan atau komponen dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Balangan. Dalam menyelenggarakan pendidikan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan UPTD memiliki SDM seluruhnya berjumlah 73 orang pegawai, yang terdistribusi pada sekretariat, Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dan bidang-bidang serta UPTD.

Kemudian yang berstatus Non PNS/Honorer sebanyak 85 orang terdiri dari tenaga honorer laki-laki sebanyak 42 orang dan tenaga honorer perempuan sebanyak 43 orang juga terdistribusi pada sekretariat, dan bidang-bidang serta UPTD. Gambaran secara umum keadaan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Balangan dan UPT
Keadaan 2016-2021

Unit Kerja	Jumlah Pegawai					
	PNS (orang)			Non PNS (orang)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
1. Sekretariat	8	3	11	8	10	18
2. Bidang Pemb. PAUD dan PNF	4	4	8	4	1	5
3. Bidang Pemb. Pendidikan Dasar	6	3	9	6	7	13
4. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana	2	3	5	3	3	6
5. Bidang Kebudayaan	5	2	7	2	3	5
Korwil Kecamatan Paringin	1	1	2	0	3	3
Korwil Kecamatan Paringin Selatan	2	1	3	2	1	3
Korwil Kecamatan Lampihong	2	3	5	2	2	4
Korwil Kecamatan Batumandi	2	1	3	3	1	4
Korwil Kecamatan Awayan	2	0	2	2	3	5
Korwil Kecamatan Tebing Tinggi	2	0	2	2	0	2
Korwil Kecamatan Juai	1	0	1	1	3	4
Korwil Kecamatan Halong	4	0	4	2	3	5
Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar	3	8	11	5	3	8

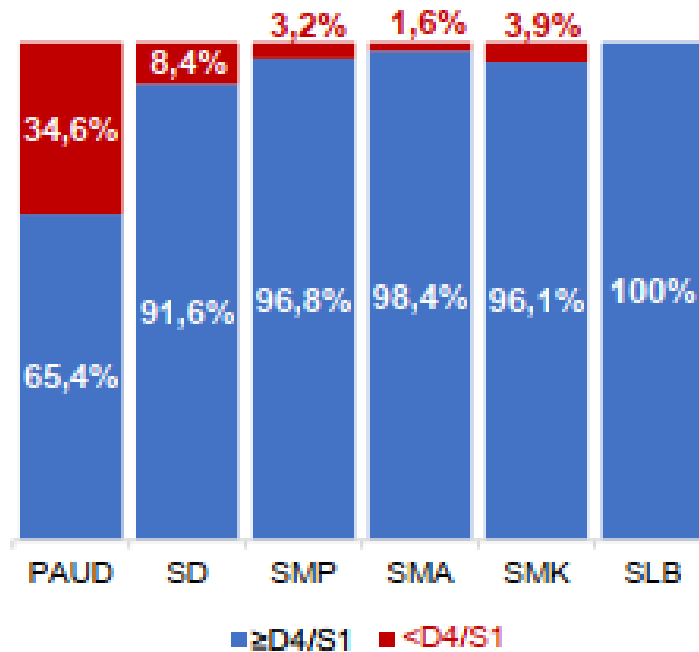
Penilik			8			
Pengawas			18			
Guru PAUD			84			478
Guru SD			1055			443
Guru SMP			196			90
Pamong Belajar			8			
JUMLAH			1442			1096
TOTAL			2538			

SKPD	JLH (ORG)	Kualifikasi Pendidikan	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	Gol	JML (ORG)
DINAS PENDIDIKAN	1889	SD	23	I/a	2	I	40
		SLTP	26	I/b	11	II	307
		SLTA	121	I/c	5	III	1012
		D1	2	I/d	22	IV	530
		D2	90	II/a	95		
		D3	18	II/b	52		
		D4	0	II/c	135		
		S1	1564	II/d	25		
		S2	45	III/a	467		
		S3	0	III/b	299		
				III/c	157		
				III/d	89		
				IV/a	521		
				IV/b	9		
				IV/c	0		
				IV/d	0		
				IV/e	0		

Gambar 1.2

Grafik Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang D4/S1
Keadaan Tahun 2020



Dilihat dari data tabel dan grafik diatas terlihat komposisi SDM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara persamaan Gender terlihat seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan, secara pendidikan untuk ASN lebih banyak yang berkualifikasi S1 dan beberapa orang S2, sedangkan pemenuhan Kualifikasi Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sampai pada Tahun 2020 terlihat pada grafik pada Jenjang PAUD Kabupaten Balangan masih kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang S1.

Didalam (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi guru) ketentuan Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi Akademik per Sekolah adalah Perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi minimum S1/DIV dengan jumlah sekolah SD/MI. "Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menempati kantor yang berada di Jalan Ahmad Yani Km.2 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.2
Komposisi Jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah
1.	Komputer PC	44
2.	Laptop	19
3.	Printer	75
4.	Sound System	4
5.	Projektor	2
6.	LCD Projektor	3
7.	TV	2
8.	Server	4
9.	Kamera	2
10.	Vacum Cleaner	
11.	Sofa	5
12.	Lemari Es	8

13.	Dispenser	6
14.	CCTV	20
15.	Brankas	5
16.	Mesin Potong Rumput	1
17.	Sepeda Motor	252
18.	Mobil Dinas pejabat	2
19.	Mobil Operasional	1
20.	Mobil angkutan Pelajar	13
21	Bis Angkutan pelajar Tambahkan jumlah sekolah	5

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bertekad untuk untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing melalui pendidikan untuk Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Balangan

digambarkan dengan perubahan perilaku ke arah perilaku berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab secara merata.

Capaian kinerja hasil pelayanan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan tujuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mewujudkan pemerintahan yang baik dengan capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Taget NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Resnra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realissi Capaian Resnra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	PENDIDIKAN																			
1	Rata-rata Lama Sekolah	IKU			RPJMD	7.70	7.79	7.88	7.97	8.06	6.31	7.03	7.65	7.27	7.55	81.95	90.24	97.08	91.22	93.67
2	Harapan Lama Sekolah	IKU			RPJMD	11.10	12.54	12.83	13.12	13.41	11.10	12.07	12.20	12.37	12.46	100.00	96.25	95.09	94.28	92.92
3	APK PAUD	IKU			SDGS	51.2	37.51	37.72	37.97	38.23	66.06	34.76	70.27	74.07	71.77	129.02	92.67	186.29	195.08	187.73
4	APK SD/Sederajat	IKU			SDGS	105.96	106.01	106.11	106.24	106.44	104.54	104.5	103.12	100.11	98.78	98.66	98.58	97.18	94.23	92.80
5	APM SD/ sederajat	IKU			SDGS	87.64	87.79	87.96	88.16	88.41	86.11	85.78	91.4	85.01	90.94	98.25	97.71	103.91	96.43	102.86
6	Angka Kelulusan SD	IKU				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Nilai rata-rata nila US SD	IKU				60	61	61.25	62	65	58.5	56.4	82.35	60.4	77.04	97.50	92.46	134.45	97.42	118.52
8	Persentase SD yang memenuhi SPM	IKU				80.5	83	85.6	85.6	85.75	80	82	85	85	92.18	99.38	98.80	99.30	99.30	107.50
9	persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	IKU				94	94	95	95	96	96.52	92.38	82.35	80.12	94.95	102.68	98.28	86.68	84.34	98.91
10	APK SMP/SEDERAJAT	IKU			SDGS	92.81	92.97	93.16	93.36	93.59	96.87	95.1	80.53	77.38	80.26	104.37	102.29	86.44	82.88	85.76
11	APM SMP/SEDERAJAT	IKU			SDGS	62.92	66.42	66.51	66.63	66.74	66.3	64.43	65.22	58.23	65.13	105.37	97.00	98.06	87.39	97.59
12	Angka Kelulusan SMP	IKU				99.9	100	100	100	100	100	100	100	99.57	99.46	100.10	100.00	100.00	99.57	99.46
13	Nilai rata-rata UN SMP	IKU				48.6	49	50	50.25	51.5	45.17	47.55	45.7	48.50	49.2	92.94	97.04	91.40	96.52	95.53
14	Persentase SMP yang memenuhi SPM	IKU				60.5	61.02	75	85	85.75	61	62	75	75.00	80	100.83	101.61	100.00	88.24	93.29
15	persentase siswa SMP melanjutkan kejenjang lebih tinggi	IKU				92	93	94	94.5	95	96.52	95.88	73.66	95.67	95.41	104.91	103.10	78.36	101.24	100.43

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Resnra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realissi Capaian Resnra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
16	Guru TK/PAUD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				42.36	64.73	64.85	65.03	65.17	48.07	51.04	55.38	53.95	91.03	113.48	78.85	85.40	82.96	139.68
17	Guru SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				70.87	75.95	76.16	76.23	76.31	74.6	74.38	79.72	81.20	92.78	105.26	97.93	104.67	106.52	121.58
18	Guru SMP yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	IKU				93.35	93.45	93.6	93.76	93.94	87.69	86.29	93.85	90.35	98.48	93.94	92.34	100.27	96.36	104.83
19	Persentase Guru SD bersertifikat	IKU				55	55.5	60	60.5	70	55.45	55.45	58.82	58.82	79.39	100.82	99.91	98.03	97.22	113.41
20	Persentase Guru SMP bersertifikat	IKU				45	65.00	70	75	80	48.34	48.34	52.43	52.43	96.04	107.42	74.37	74.90	69.91	120.05
21	Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah	IKU				100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Kepala Sekolah	IKU				95	95.00	100	100	100	95	100	100	100	100	100	105.26	100	100	100
28	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	66.55	66.55	66.55	0	0	66.55	66.55	66.55
29	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	84.65	84.65	84.65	0	0	84.65	84.65	84.65
30	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun		SPM			0	0	100	100	100	0	0	80.36	80.36	80.36	0	0	80.36	80.36	80.36
31	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	66.55	0	0	0	0	66.55
32	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	90.09	0	0	0	0	90.09
33	tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	72.86	0	0	0	0	72.86
34	tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan			IKK		0	0	0	0	100	0	0	0	0	80.25	0	0	0	0	80.25

*Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulangan Tahun 2021 - 2026*

NO	Indikator Kinerja	Taget NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Lainnya	Target Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Realissi Capaian Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
35	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	IKU									100%	100%	100%	100%	100%					
36	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	IKU									100%	100%	100%	100%	100%					
37	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	IKU									118.31	116.47	115.04	114.67	114.23					
38	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	IKU									35.44	30.26	30.56	30.72	31.34					
39	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	IKU									1175.77	1159.95	1163.86	1148.55	1143.8					
40	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	IKU									984.9	918.2	856.26	882.1	885.01					
41	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	IKU									1:12	1:12	1:12	1:12	1:12					
42	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	IKU									1:25	1:25	1:25	1:25	1:25					
43	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	IKU									95.90%	93.81%	94.49%	91.54%	92.23%					
44	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	IKU									97.75	97.78	98.76	98.77	99.78					
45	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	IKU									99.47%	99.60%	99.69%	99.70%	99.67%					
	KEBUDAYAAN																			
46	Jumlah Siswa Binaan dibidang seni Budaya	IKU			RPJMD	20	20	30	50	70	25.00	25.00	30.00	50	77	125.00	125.00	100	100	110
47	Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang digelar dan diikuti	IKU			RPJMD	11	18	19	20	21	11	10	20	20	3	100	55.56	105.26	100	14.29
48	Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara	IKU			RPJMD	4	5	6	7	8	0	10	5	5	8	0.00	200	83.33	71.43	100
49	Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan lengkap	IKU			RPJMD	1	2	3	4	5	4	4	6	4	5	400	200	200	100	100

Tabel. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tabel 2016-2020

NO	Program	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.675.131.640	6.925.361.934	6.906.321.034	7.018.323.534	4.974.271.099	7.008.542.280	5.721.180.562	6.016.032.125	6.326.926.582	3.819.395.179	80,79	82,61	87,11	90,15	76,78	-17,50	66,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.811.551.874	7.567.750.250	4.315.000.000	2.467.150.000	3.829.350.000	4.425.818.170	6.044.565.566	4.009.045.610	2.196.125.050	3.372.216.800	91,98	79,87	92,91	89,01	88,06	-14,18	88,37
3	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur		718.050.000	673.300.000	582.000.000	191.400.000		668.255.630	632.470.800	582.000.000	185.289.500			93,94	100,00	96,81	31,17	96,91
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	135.806.600	400.000.000	513.141.900	400.000.000	136.876.701	77.586.600	98.200.000	170.324.700	330.700.000	70.500.000	57,13	24,55	33,19	82,68	51,51	-78,85	49,81
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.658.004.390	6.306.399.805	6.337.425.360	2.591.673.140	5.584.273.850	1.464.323.210	4.870.356.350	5.381.220.800	2.136.652.390	5.347.107.945	88,32	77,23	84,91	82,44	95,75	-13,52	85,73
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28.188.258.781	27.049.918.600	30.786.975.000	18.920.766.000	29.103.472.760	26.815.810.168	22.132.360.160	28.677.069.590	16.844.874.750	27.857.327.080	95,13	81,82	93,15	89,03	95,72	-10,51	90,97
7	Program Pendidikan Menengah	7.411.609.990	14.476.084.000	15.360.777.075	9.810.765.000	12.650.556.500	7.017.774.087	12.027.025.462	13.040.615.678	8.965.841.448	11.519.640.005	94,69	83,08	84,90	91,39	91,06	-13,67	89,02
8	Program Pendidikan Non Formal	2.198.569.276	8.018.834.300	7.781.361.600	9.524.187.300	9.463.703.240	2.045.903.100	6.028.828.095	4.003.363.200	9.101.811.214	9.070.346.970	93,06	75,18	51,45	95,57	95,84	-26,35	82,22
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.393.864.800	2.340.485.800	3.229.770.000	2.159.683.000	1.295.999.101	2.165.780.205	2.035.663.735	2.763.999.750	1.936.660.959	1.120.739.101	90,47	86,98	85,58	89,67	86,48	-14,02	87,84
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		7.079.250.000	7.073.403.900	7.370.100.000	6.535.650.000		3.419.298.900	7.347.092.000	5.019.680.000	6.139.210.000		48,30	103,87	68,11	93,93	10,67	78,55
10	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		95.250.000	141.320.000	259.060.000	81.497.000		68.342.000	110.735.576	220.258.000	78.299.000		71,75	78,36	85,02	96,08	14,75	82,80
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		1.689.865.000	1.095.755.000	785.225.000	562.690.000		1.261.437.200	110.735.576	699.803.100	520.366.600		74,65	10,11	89,12	92,48	-145,00	66,59

Menurut Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, perkembangan IPM diseluruh Kabupaten Kota dikalimantan selatan, Kabupaten Balangan termasuk dalam tertinggi dalam peningkatan IPM. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada sebagian besar kabupaten/kota. Selama periode 2019 hingga 2020, delapan kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM dan lima kabupaten mengalami penurunan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu **Kabupaten Balangan (tumbuh 0,63 persen)**, Kabupaten Tabalong (0,57 persen), dan Kabupaten Tanah Laut (0,49 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut lebih didorong oleh dimensi pendidikan. Sementara, tiga kabupaten yang tumbuh paling rendah adalah Kota Banjarbaru (-0,15 persen), Kabupaten Kotabaru (-0,13 persen), dan Kota Banjarmasin (-0,08 persen). Rendahnya pertumbuhan ketiga kabupaten ini disebabkan oleh turunnya pengeluaran per kapita, sementara peningkatan pada dimensi lainnya tidak cukup mampu mengangkat IPM secara agregat.

Gambar 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019-2020

Provinsi/Kab/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019-2020
Tanah Laut	69,31	69,45	11,96	12,01	7,64	7,88	11 318	11 207	69,04	69,38	0,49
Kota Baru	69,10	69,21	11,92	11,93	7,42	7,43	11 731	11 530	68,95	68,86	-0,13
Banjar	66,97	67,21	12,28	12,44	7,34	7,35	12 681	12 603	68,94	69,18	0,35
Barito Kuala	65,88	66,09	12,38	12,39	7,33	7,34	9 952	9 805	66,24	66,22	-0,03
Tapin	70,23	70,40	11,86	11,94	7,75	7,76	12 088	11 841	70,13	70,11	-0,03
Hulu Sungai Selatan	65,82	65,97	12,10	12,17	7,74	7,75	12 835	12 672	68,80	68,85	0,07
Hulu Sungai Tengah	65,82	66,01	12,19	12,20	7,99	8,00	12 257	12 153	68,80	68,84	0,06
Hulu Sungai Utara	63,58	63,83	12,88	12,91	7,37	7,53	9 772	9 527	65,49	65,59	0,15
Tabalong	70,33	70,44	12,59	12,72	8,78	9,10	11 476	11 283	71,78	72,19	0,57
Tanah Bumbu	70,08	70,34	12,36	12,37	7,71	7,96	12 025	11 718	70,50	70,71	0,30
Balangan	67,59	67,72	12,37	12,46	7,27	7,55	11 557	11 452	68,39	68,82	0,63
Kota Banjarmasin	70,98	71,13	13,92	13,93	9,94	9,95	14 547	14 306	77,16	77,10	-0,08
Kota Banjar Baru	71,87	71,99	14,80	14,81	10,94	10,95	13 949	13 675	79,22	79,10	-0,15
Kalimantan Selatan	68,49	68,66	12,52	12,68	8,20	8,29	12 253	12 032	70,72	70,91	0,27

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS di Kabupaten Balangan selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dari 6,31 tahun pada tahun awal Renstra Dinas Pendidikan menjadi 7,55 tahun diakhir tahun periode Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Walaupun terjadi sedikit peningkatan namun untuk di bandingkan Kabupaten lain se Propinsi Kalimantan Selatan sudah mampu berada di peringkat 8 dari 13 Kabupaten/Kota padahal Balangan merupakan salah satu Kabupaten termuda di Propinsi Kalimantan Selatan.

Pada akhir masa periode Renstra Dinas Pendidikan untuk RLS masih dibawah target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Target akhir di Kabupaten Balangan RLS pada periode Rentsra 2016-2021 adalah 8,06 dan capaiannya adalah 7,55. Artinya, secara rata-rata penduduk Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau hampir menamatkan kelas VII jenjang SMP. Kabupaten Balangan secara urutan Provinsi berada pada urutan ke 8 dari 13 dalam capaian RLS.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Target akhir di Kabupaten Balangan HLS pada periode Rentsra 2016-2021 adalah 13,41 dan capaiannya adalah sebesar 12,46. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,46 tahun atau setara dengan Diploma I.

Pada akhir masa periode Renstra Dinas Pendidikan untuk HLS masih dibawah target yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Target akhir di Kabupaten Balangan HLS pada periode Rentsra

2016-2021 adalah 13,41 dan capaiannya adalah 12,46. Kabupaten Balangan secara urutan Provinsi berada pada urutan ke 8 dari 13 dalam capaian HLS.

Berapa penyebab tidak tercapainya target pada akhir periode Rentsra 2016-2021 adalah adanya Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, Susah Akses pendidikan khususnya daerah terpencil, belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata, kurangnya jumlah guru bersertifikasi, belum optimalnya jumlah guru dengan jenjang pendidikan Strata 1, belum optimalnya jumlah guru yang mendapatkan pelatihan, masih adanya angka putus sekolah, belum optimalnya pendidikan kesetaraan.

Tabel. 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Capaian Pelayanan Dasar (SPM) Pendidikan Kabupaten Balangan
Tahun 2020

No	Jenjang pendidikan	Jumlah penduduk	Jumlah murid perjenjang	Persentase penerima layanan
1	PAUD (5-6 tahun)	4.819	3.207	66,55
2	Dasar (7-15 tahun)	22.149	18.750	84,65
3	Kesetaraan (7-18 tahun)	29.488	23.665	80,36

Tabel. 2.7

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1811	1791	1786	1761	1733
1.2	Jumlah Murid	14846	14817	15085	14949	1543
1.3	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:8	1:9 (1144,4)
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	642	621	614	601	605
2.2	Jumlah Murid	6017	5977	5840	5616	5780
2.3	Rasio	1:9	1:10	1:10	1:9	1:10 (1047,7)

Tabel. 2.9

Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2020

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
16.	Kebudayaan				
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	17	8	17	1
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	8	8	10

16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	4	5	5	8
------	--	---	---	---	---

Penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan satu kali yaitu gelar seni budaya, sedangkan untuk kegiatan lainnya ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terdapat 10 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, delapan di antaranya dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Makam Kandang Haji, Rumah Palimbangan Desa Riwa, Rumah Batu Desa Muara Ninian, Makam Datu Martika, Kawasan Lama Lampihong, Makam Raksasina Singa Jaya, Makam Tumenggung Jalil dan Benteng Tundakan, sedangkan dua dikelola oleh pusat yaitu Mesjid syuhada Desa Hujan Mas dan Rumah Bubungan Tinggi Desa Tarangan. Persoalan dalam pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya adalah perlunya pemeliharaan fisik untuk menjaga cagar budaya dari kerusakan ataupun kepunahan.

Tabel 2.10

Capaian Indikator SPM Kesenian
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian					
		Cakupan Kajian Seni 50%	27	40	26,66	20
		Cakupan Fasilitas Seni 30%	57	57	33,33	0
		Cakupan Gelar Seni 75%	75	75	50	25

		Misi Kesenian 100%	100	100	100	0
2	Sarana dan Prasarana					
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	42,85	42,85	42,85	42,85
		Cakupan Tempat 100%	100	100	100	100
		Cakupan Organisasi 34%	0	66,66	66,66	66,66

Cakupan kajian seni pada tahun 2020 hanya 20% berupa dokumentasi (bentuk buku/katalog), Penyerapan narasumber (setiap ada kegiatan SDM daerah yang menjadi narasumber), Inventarisasi (penyimpanan alat- alat kesenian). Untuk Cakupan Fasilitas Seni, cakupan misi kesenian dan Cakupan Gelar Seni tidak memenuhi standar, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga untuk kegiatan kesenian ditiadakan. Cakupan Organisasi yang dimiliki Kabupaten Balangan adalah organisasi struktural yang menangani kesenian dan Lembaga/Dewan Kesenian Balangan. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian di Kabupaten Balangan adalah sarjana seni, seniman dan insan media masa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

Telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pembangunan sektor Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing bidang. Untuk urusan pendidikan dalam Kabupaten difokuskan pada program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, sedangkan untuk urusan Kebudayaan lebih difokuskan pada pengembangan Kebudayaan Daerah, Kesenian Traditional, Sejarah, Cagar Budaya, Permuseuman dan Cagar Budaya Daerah.

Secara singkat **tantangan** OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah :

1. Adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang bermutu;
2. Adanya mobilitas penduduk yang tinggi yang berpotensi menimbulkan masalah pendidikan baru;
3. Penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduknya;
4. Tumbuhnya pelayanan pendidikan swasta yang mutunya lebih baik;
5. Masih adanya budaya masyarakat yang tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan pendidikan;

Sedangkan **Peluang** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah

- a. Adanya dukungan DPRD Kabupaten Balangan serta pemangku kepentingan lain dalam pembangunan pendidikan
- b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD
- c. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah termasuk di dalamnya adalah Standar Nasional Pendidikan
- d. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan
- f. Adanya program dan kebijakan prioritas Kepala Daerah terpilih yang baru yang mendukung pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Balangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Balangan merupakan kabupaten hasil pemekaran kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Balangan terdiri atas delapan kecamatan dengan ibukota di Paringin. Kondisi geografis di Balangan sebagian besar didominasi oleh hutan karet dan persawahan. Hal ini berarti bahwa pendapatan sebagian besar penduduk dari menoreh dan bertani. Kondisi mata pencaharian ini tidak hanya dikerjakan oleh orang tua atau orang-orang yang produktif saja, tetapi dapat dikerjakan oleh anak dibawah produktif atau anak usia sekolah. Hal ini berdampak pada masih adanya anak yang belum bersekolah atau putus sekolah bukan karena ekonomi tak mampu tetapi karena pekerjaan sehari-hari telah dapat memberikan penghasilan bagi anak usia sekolah. Dampak ini pun meluas, orang tua atau masyarakat kurang berminat melirik pendidikan.

Memantapkan Program Wajar Dikdas, Pemerintah mengambil kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berarti bahwa biaya untuk pendidikan dasar diharapkan sangat murah bahkan dimungkinkan adanya sekolah gratis.

Selain itu, Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan guru secara kualitas maupun kuantitas, serta persebaran dan proporsional, antara lain melalui penerimaan pegawai baru, pengangkatan guru honor menjadi PNS, dan pengangkatan guru kontrak melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tentu saja hal ini juga dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana, selain faktor pendukung pendidikan lainnya seperti buku pelajaran, perpustakaan, ruang UKS.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Balangan jauh dari perguruan-perguruan tinggi negeri, namun karena semangat guru agar

bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku, kondisi tersebut tidak menjadi kendala.

Pemerintah sangat memahami masih belum terpenuhinya penghasilan guru yang memadai dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pemerintah masih terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah telah menjalankan program dan kebijakan:

1. Pemberian insentif berupa subsidi bagi guru swasta serta pengawas sekolah yang nilainya terus ditingkatkan
2. Pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi dan guru yang mempunyai dedikasi tinggi, melalui seleksi guru berprestasi
3. Bahkan untuk kepentingan kesejahteraan namun tidak menggalkan faktor pelayanan masyarakat difasilitasinya guru untuk mengikuti sertifikasi.

Disamping memberikan pelayanan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, Pemerintah juga memberikan layanan pendidikan di luar usia wajib belajar, seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, sekolah menengah, bahkan dimungkinkan akan dibuka pelayanan pendidikan luar biasa dan perguruan tinggi.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk berkembangnya potensi anak sejak dini (0 – 6 tahun) sehingga mereka dapat berkembang secara wajar sebagai anak. Sasaran PAUD tidak hanya mempersiapkan anak pada usia masuk sekolah dasar, melainkan juga agar anak-anak memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial, dan emosional yang disesuaikan dengan tingkat usianya. Pada gilirannya nanti akan berdampak pada kesiapan anak masuk sekolah sehingga diharapkan tidak terjadi mengulang kelas dan putus sekolah, minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Pemberantasan buta aksara bertujuan agar penduduk atau masyarakat dapat melek huruf atau bebas dari buta huruf. Ada tiga tahapan penanganan buta huruf yakni pemberantasan, pembinaan dan

pelestarian yang penanganannya dipadukan dengan program pusat dan propinsi. Pemerintah telah melakukan upaya pemberantasan buta huruf melalui pembelajaran dan pembinaan melalui keaksaraan fungsional.

Dalam upaya pemberantasan buta huruf Pemerintah kabupaten memprogramkan sejumlah sasaran Keaksaraan Fungsional yang tidak terdapat dalam Program dari Provinsi maupun Pusat. Untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat unit pelaksana pendidikan atau sekolah, maka telah dikembangkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam pelaksanaannya, MBS melalui langkah-langkah yang secara bertahap diharapkan akan lebih operasional antara lain, melalui sosialisasi dan diseminasi, perintisan penerapan, reorganisasi dan untuk menetapkan pelaksanaan MBS pada mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Berkaitan dengan kurikulum, dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan pembangunan, peran pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan yang menguasai iptek dan imtaq memiliki pengetahuan dan teknologi memiliki posisi yang sangat penting. Oleh karena itu kurikulum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dikembangkan ke sekolah-sekolah dengan harapan akan terbentuk satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum hasil modifikasi bahkan kreasi guru, bukan sekedar kurikulum hasil adaptasi.

Dalam rangka penataan manajemen yang lebih luas, pengelolaan pendidikan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas. Oleh karena itu, telah diberlakukan berbagai aturan yang akan menjadi acuan dalam peningkatan pengelolaan pendidikan, antara lain sistem perencanaan dan penganggaran, pembinaan ketenagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendidikan.

Manajemen pendataan dengan system Pedati Web sangat membantu berbagai pengguna untuk menggunakan data secara akurat

dan cepat. Dengan adanya jaringan pendidikan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sangat memfasilitasi kabupaten untuk pengembangannya, sehingga melalui jaringan induk tersebut dapat diperluas pengguna-pengguna jaringan. Hingga saat ini telah bisa menikmati jaringan pendidikan di sejumlah sekolah. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala terutama kendala geografis pada sekolah tertentu. Kondisi geografis menjadi kendala karena pertimbangan efisiensi anggaran yang menyebabkan sekolah jauh belum dapat menikmati fasilitas jaringan.

Pengorganisasian aparat diarahkan ke manajemen berbasis kinerja. Hal ini berkaitan dengan MoU dengan Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan Good Governance, di samping Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan juga melaksanakan peningkatan kapasitas baik kuantitas maupun kualitas, layanan sektor publik, pencegahan terhadap upaya-upaya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan kesadaran antikorupsi, serta pemberian kesempatan pengaduan bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas secara kuantitas dilaksanakan dengan peningkatan jumlah aparat dalam pemberian layanan publik, sedangkan secara kualitas dilaksanakan dengan penyediaan buku-buku acuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan atau mengikutsertakan dalam diklat dan sejenisnya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur ; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut :

Analisis Internal

1. Kekuatan

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Balangan antara lain :

- a. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan secara bersinambungan, efektif efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga ditingkat propinsi, nasional maupun internasional. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Balangan untuk mendukung dan memantapkan misi Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia Global. Hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator operator yang handal dan terampil.
- d. Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.
- e. Tersedianya organisasi seni dan budaya di Kabupaten Balangan yang jumlah dan minatnya untuk pengembangan kebudayaan semakin meningkat.

2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak- anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah dan beberapa kasus pernikahan usia dini.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, karena di beberapa kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten kondisinya masih belum memadai dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Dilain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk

mengembang tugasnya secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metode pembelajaran, dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mencapai IPM yang ditargetkan adalah :

a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jangkauan layanan pendidikan bagi usia dini dan usia sekolah secara berkeadilan adalah:

- 1) Masih rendahnya angka partisipasi kasar PAUD
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni, juga angka putus sekolah. Masih terdapat desa yang belum memiliki PAUD dan masih adanya kesulitan akses menuju sekolah pada desa terpencil
- 3) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya program kelompok belajar serta masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan **jangkauan layanan pendidikan** bagi remaja dan orang dewasa adalah:

- 1) Masih ada penduduk di Kabupaten Balangan yang buta aksara, meskipun jumlahnya sedikit
- 2) Masih rendahnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi untuk memberikan keterampilan bagi remaja dan orang dewasa
- 3) Angka rata-rata lama sekolah masih berkisar pada 7,55 tahun (Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau hampir menamatkan kelas 1 SMP)

- 4) Angka harapan lama sekolah masih berkisar pada 12,46 tahun (Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,46 tahun atau setara dengan hampir menamatkan kelas 3 SLTA)
 - 5) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan layanan pendidikan** sekolah yang bermutu adalah :
- 1) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi secara lokal
 - 2) Masih rendahnya persentase SD yang terakreditasi A
 - 3) Masih rendahnya persentase SMP yang terakreditasi A
 - 4) Masih rendahnya persentase SD yang berpredikat sekolah Adiwiyata
 - 5) Masih rendahnya persentase yang berpredikat sekolah Adiwiyata;
 - 6) Belum terpenuhinya capaian indikator SPM pada sekolah SD
 - 7) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan pada Bina SD yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter
 - 8) Masih rendahnya persentase capaian indikator SPM pada jenjang PAUD
 - 9) Masih rendahnya persentase capaian indikator SPM pada jenjang Pendidikan Dasar
 - 10) Masih rendahnya persentase satuan pendidikan jenjang SMP yang sudah melaksanakan kurikulum pendidikan karakter.
- d. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan efektifitas layanan pendidikan** adalah:
- 1) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SD
 - 2) Upaya mempertahankan angka kelulusan SD
 - 3) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket A
 - 4) Upaya mempertahankan angka melanjutkan siswa SD/MI

- 5) Masih adanya anak putus sekolah tingkat SMP
 - 6) Upaya mempertahankan angka kelulusan SMP
 - 7) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket B
 - 8) Upaya meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP/MTs
 - 9) Upaya mempertahankan angka kelulusan Paket C
- e. Permasalahan yang dihadapi dalam **peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan** adalah :
- 1) Upaya meningkatkan PTK Tk dan PAUD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 (65,04 %)
 - 2) Upaya meningkatkan angka PTK SD yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 (92,78 %)
 - 3) Upaya meningkatkan angka PTK SMP yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 (94,48 %)
 - 4) Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata
- f. Permasalahan yang dihadapi dalam **pengembangan Seni dan Budaya Balangan** :
- 1) Minimnya SDM dalam pengembangan seni dan budaya tradisional di Balangan
 - 2) Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan aktivitas seni bagi para pelaku seni/sanggar seni/komunitas seni (tempat latihan/kegiatan, kostum, alat musik)
 - 3) Tidak adanya Tim ahli Cagar budaya balangan
- g. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan **layanan dan akuntabilitas** adalah:
- 1) Upaya tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat;
 - 2) Upaya peningkatan indeks kepuasan pelayanan internal;
 - 3) Nilai evaluasi SAKIP yang masih CC;

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi masalah pokok pada urusan pendidikan adalah seperti tabel dibawah :

Tabel 2.12
Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia
dan Permasalahan Bidang Sosial Budaya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan lama Sekolah	1. Rendahnya rasio gedung sekolah dengan penduduk	1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai 2. Susah Akses pendidikan khususnya daerah terpencil
	2. Rendahnya rasio guru dengan murid	1. Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata.
	3. Rendahnya kompetensi guru	1. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi 2. Belum optimalnya jumlah guru dengan jenjang pendidikan Strata 1 3. Belum optimalnya jumlah guru yang mendapatkan pelatihan
	4. Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun	Masih adanya angka putus sekolah

	5. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan	Belum optimalnya pendidikan kesetaraan
--	--	--

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya Budaya Balangan yang terlestarikan	Belum Optimalnya Pengembangan Seni dan Budaya Balangan	Rendahnya penyelenggaraan festival seni dan budaya
		Belum optimalnya pemeliharaan fisik cagar budaya
		Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan

3.1.1 Isu Strategis Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Isu strategis bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan hasil analisa permasalahan di bidang pendidikan yaitu perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Pada bidang pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan sehingga perlunya peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi

guru dan sarana prasarana. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Pada aspek kebudayaan, Kabupaten Balangan sejauh ini masih memiliki kendala belum optimalnya perawatan cagar budaya, dan belum optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan secara berkala dikarenakan pandemic Covid 19. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perawatan cagar budaya Balangan, dengan menggali dari sisi value apabila cagar budaya tersebut lestari dan dapat memiliki nilai tambah salah satunya menarik potensi wisata edukasi. Kemudian terkait pengembangan seni dan budaya Balangan yang terkendala pandemi Covid 19, sangat diperlukan upaya serta terobosan penyesuaian normal baru.

Analisis Eksternal

1. Peluang

Peluang yang ada atau memungkinkan dan menjadi daya dukung:

1. Tersedianya anak usia sekolah (4-6 tahun) dan usia sekolah (7-15 tahun)
2. Kondisi alam dan lingkungan sekolah mendukung
3. Tersedianya daya tampung bagi anak usia sekolah
4. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap prioritas pembangunan pendidikan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta
6. Tersedianya guru yang telah mengikuti pelatihan pada tingkat regional maupun nasional
7. Adanya perhatian organisasi kemasyarakatan untuk bergerak dalam pemberantasan buta aksara, seperti PKBM, LSM, Karang taruna, Aisyiah/Muslimat NU, Pramuka dan Remaja Masjid.

2. Tantangan

Yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain :

a. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1. Sedikitnya satuan pendidikan prasekolah kurang mendukung meningkatnya angka partisipasi murni
2. Prasarana belajar (gedung/ tempat belajar dan mebel) yang sangat minim kurang kondusif untuk strategi pembelajaran Prasekolah
3. Sarana bermain dan alat peraga yang minim kurang mendukung pendekatan pembelajaran usia prasekolah
4. Belum optimalnya manajemen TK dan PAUD
5. Kurangnya lembaga kursus seperti kursus keterampilan kerja, kursus estetika dan kursus etika dan kepribadian yang diminati oleh masyarakat agar cepat bekerja.

b. Bidang Pendidikan Dasar

1. Masih ada anak usia sekolah yang karena kondisi geografis belum dapat menikmati pendidikan dasar
2. Prasarana belajar (gedung/ tempat belajar dan mebel) yang sangat minim kurang kondusif untuk strategi pembelajaran
3. Sarana praktik dan alat peraga yang minim kurang mendukung pendekatan pembelajaran usia prasekolah
4. Belum optimalnya manajemen Sekolah Dasar
5. Adanya anggapan sebagian masyarakat yang secara finansial dan akademik kurang mampu memandang bahwa pendidikan merupakan beban yang sangat berat
6. Belum terpenuhinya harapan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang masuk dalam dunia kerja dan persaingan global
7. Belum optimalnya sistem manajemen, sehingga potensi akademik calon peserta didik belum terjamin mutunya
8. Masih rendah angka partisipasi karena rendahnya kemampuan orang tua dan masyarakat untuk membiayai pendidikan

9. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sekolah pada anak-anak mereka

Melihat kekuatan maupun kelemahan yang ada, secara faktual Kabupaten Balangan memiliki peluang untuk dapat berkembang sebagai Kota Pendidikan yang dapat memberikan layanan tidak hanya terhadap masyarakat Kabupaten namun dapat terus diperluas kepada masyarakat di sekeliling Kabupaten Balangan, bahkan untuk masyarakat dimanapun yang mendambakan pelayanan pendidikan yang baik. Dengan ditangani secara sinergi dalam sistem pengembangan pada bidang-bidang lainnya di Kabupaten Balangan, bidang pendidikan dapat membuka peluang kerja yang luas, serta secara tidak langsung bersentuhan dengan dinamisasi kegiatan ekonomi masyarakat luas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu :

**“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA,
MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU
DAN SEJAHTERA”**

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.

3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Perumusan visi Kabupaten Balangan lima tahun kedepan diuraikan ke dalam tabel, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13

Perumusan Visi Kabupaten Balangan 2021-2026

No	Masalah	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Belum Terwujudnya Pembangunan Pedesaan yang Ideal serta belum maksimalnya Konektivitas di setiap Desa Kabupaten Balangan	Membangun Desa	Membangun desa, menata kota menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera
2	Belum Terwujudnya Sentra Daerah Perkotaan di Kabupaten Balangan	Menata Kota	
3	Belum Tercapainya standar IPM yang diharapkan di	Maju dan Sejahtera	

Kabupaten Balangan		
--------------------	--	--

Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Melihat dari uraian Diatas visi misi yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pada **Visi uraian ke 3** yaitu Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan. Dinas pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mampu memberikan support dalam peningkatan IPM dengan Program Kegiatan yang dilaksanakan, dan diturunkan dalam Sasaran Meningkatkan Angka Rata-Rata lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Sedangkan visi terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan adalah pada **Misi ke 3 dan ke 5**, yaitu dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan maksimalnya kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan kehidupan kebudayaan.

Faktor-faktor pendorong ketercapaian dari Visi Misi pada Urusan Dinas pendidikan adalah melihat dari Kebijakan dan Program yang ada pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang mendukung dari Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Daerah, pemerataan peningkatan Layanan dari jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah Pertama. Sedangkan untuk urusan Kebudayaan, Kabupaten Balangan memiliki Situs-situs Cagar Budaya dan Kesenian Daerah yang lumayan banyak, ini memiliki potensi untuk lebih mudah dalam pengembangan Kebudayaan ke masa akan datang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk :

**“MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN MELALUI TERCIPTANYA PELAJAR
PANCASILA YANG BERNALAR KRITIS, KREATIF, MANDIRI,
BERIMAN, BERTAKWA KEPADA TUHAN YME, DAN BERAKHLAK
MULIA, BERGOTONG ROYONG, DAN BERKEBINEKAAN GLOBAL”**

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor **(1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia**; nomor **(5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa**; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Visi dan Misi serta Isu Strategis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang yaitu:

Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan

masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kalimantan Selatan menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Saat ini, sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya.

Tabel 2.14

Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan
Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun yang diampu Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

No.	Nawa Cita Tahun 2020- 2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021- 2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021- 2026	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia (Nawacita 1)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan	Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Meningkatnya Indeks Pendidikan

No.	Nawa Cita Tahun 2020-2024	Prioritas Daerah Prov.Kalsel Tahun 2021-2026	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
		Penanganan Masalah Sosial			
2	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa (Nawacita 5)	Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keterampilan, dan Penanganan Masalah Sosial	kehidupan sosial, budaya, dan agama yang kondusif	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200). Secara umum Kabupaten Balangan masih

menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Balangan, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Proritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; **3) Pendidikan Berkualitas**, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8)

KesehatanTerkait dengan kajian KLHS yang perlu diselesaikan adalah pendidikan berkualitas sehingga untuk mencapai tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menetapkan tujuan dengan berbagai kebijakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

Untuk merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021-2026 yang lebih jelas menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

a. Tujuan

Didasarkan kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan jangka menengah Kabupaten Balangan, sebagai berikut :

Meningkatnya Indeks Pendidikan merupakan tujuan yang akan dituju oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena dalam target Makro daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan masih menargetkan Peningkatan IPM, ini berarti indeks penyusunnya dan turunannya dalam SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **Meningkatnya Indeks Pendidikan**, yang indikatornya adalah Angka rata-rata lama sekolah dan Angka Harapan lama Sekolah. Kemudian pada urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bertujuan **Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan**, yang indikatornya adalah Persentase pengembangan Seni dan Budaya

b. Sasaran

Sasaran strategis adalah menjabarkan dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata. Untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut maka sasaran Urusan Pendidikan adalah :

**Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Balangan.**

Tabel 2.15

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan OPD tahun 2021-2026

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA

Misi : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7.55	7.82	8.09	8.36	8.63	8.9	9.17
			Angka Harapan Lama Sekolah	12.46	12.59	12.72	12.85	12.98	13.11	13.24

2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan	Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48.38%	52%	58.06%	68%	81%	87%	100%
---	---	--	---	--------	-----	--------	-----	-----	-----	------

Indikator keberhasilan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK)
- 2) Meningkatkan angka partisipasi murni (APM)
- 3) Meningkatnya nilai rerata ujian nasional
- 4) Menurunnya angka mengulang
- 5) Menurunnya angka putus sekolah
- 6) Meningkatnya angka kelulusan
- 7) Perbandingan ruang kelas dan siswa
- 8) Meningkatnya ketersediaan ruang perpustakaan
- 9) Perbandingan alat peraga dan siswa
- 10) Perbandingan buku pelajaran UN dan siswa
- 11) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1 PGTK
- 12) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1 PGSD
- 13) Meningkatnya jumlah guru SLTP kualifikasi S1
- 14) Meningkatnya jumlah guru SLTA kualifikasi S1
- 15) Berkurangnya angka buta aksara pada usia kurang dari lima belas tahun
- 16) Persentase Lembaga adat yang dibina dengan baik
- 17) Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat
- 18) Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota
- 19) Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan
- 20) Persentase cagar budaya yang dikelola

BAB V

STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran Resntra.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
2. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
3. Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan

Tabel 2.16

Tujuan Sasaran dan Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan

MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA

Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"			
TUJUAN SKPD		SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan rata-rata lama sekolah
			Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Balangan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Kebudayaan

b. Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, arah kebijakan ditempuh dengan upaya-upaya sebagaimana tersaji dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.17

**Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
Balangan**

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi Ke -3 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan					
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi	Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi
Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan	Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan
Misi Ke -5 : Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif					
Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.	Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya	Pelestarian cagar budaya

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA								
Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"								
	TUJUAN SKPD	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 5%;">1</td> <td style="padding: 5px;">Peningkatan rata-rata lama sekolah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="padding: 5px;">Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah</td> </tr> </table>	1	Peningkatan rata-rata lama sekolah	2	Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan ketersediaan Satuan Pendidikan di daerah terpencil 3. Peningkatan pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Peningkatan jumlah guru bersertifikasi 5. optimalisasi jumlah guru dengan jenjang pendidikan
1	Peningkatan rata-rata lama sekolah							
2	Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah							
			66					

						minimal Strata 1 6. optimalisasi jumlah guru yang mendapatkan pelatihan 7. Penurunan angka putus sekolah
Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Balangan	1	Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan	29	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. optimalisasi pemeliharaan fisik cagar budaya 3. optimalisasi pengembangan seni dan budaya Balangan

Tabel 2.2.19

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Target Capaian

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA												
Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"												
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
3	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah	7,55	7,82	8,09	8,36	8,63	8,9	9,17	9,17
		angka Harapan lama sekolah		angka Harapan lama sekolah	12,46	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24
Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"												
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
5	Meningkatnya Pelestarian Budaya Asli Balangan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	52	58	68	81	87	100	100

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan dan Indikator

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

PENDIDIKAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Penambahan Ruang Kelas Baru

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Penambahan Ruang Kelas Baru
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Laboratorium
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
Pertama
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas PAUD

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan*

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

*Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat*

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat

KEBUDAYAAN

5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota*

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesenian Tradisional

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

6. Program Pembinaan Sejarah

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi
Sejarah

7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Penetapan Cagar Budaya

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Pelindungan Cagar Budaya

Pemanfaatan Cagar Budaya

Tabel 2.20

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		1.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah	100	100	%	169.105.445.362	100	%	169.105.445.362	100	%	186.015.989.896	100	%	204.617.588.884	100	%	225.079.347.770	100	%	247.587.282.545	100	%	247.587.282.525		
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	100	100	%	112.250.000	100	%	112.250.000	100	%	123.475.000	100	%	135.822.500	100	%	149.404.750	100	%	164.345.225	100	%	164.345.225		
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	8.650.000	5	dokumen	8.650.000	5	dokumen	9.515.000	5	dokumen	10.466.500	5	dokumen	11.513.150	5	dokumen	12.664.465	5	dokumen	12.664.465			
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	103.600.000	2	dokumen	103.600.000	2	dokumen	113.960.000	2	dokumen	125.356.000	2	dokumen	137.891.600	2	dokumen	151.680.760	2	dokumen	151.680.760			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	%	164.634.835.754	100	%	164.634.835.754	100	%	181.098.319.329	100	%	199.208.151.262	100	%	219.128.966.389	100	%	241.041.863.027	100	%	241.041.863.027		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pelaksanaan pembayaran sejumlah gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	164.011.495.754	12	bulan	164.011.495.754	12	bulan	180.412.645.329	12	bulan	198.453.909.862	12	bulan	218.299.300.849	12	bulan	240.129.230.933	12	bulan	240.129.230.933			
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pelaksanaan pembayaran Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	bulan	623.340.000	12	bulan	623.340.000	12	bulan	685.674.000	12	bulan	754.241.400	12	bulan	829.665.540	12	bulan	912.632.094	12	bulan	912.632.094			
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	%	242.300.000	100	%	242.300.000	100	%	266.530.000	100	%	293.183.000	100	%	322.501.300	100	%	354.751.430	100	%	354.751.430		
		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut bagi ASN SKPD	150	lbr	42.300.000	150	lbr	42.300.000	150	lbr	46.530.000	150	lbr	51.183.000	150	lbr	56.301.300	150	lbr	61.931.430	150	lbr	61.931.430			
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	12	bulan	200.000.000	12	bulan	200.000.000	12	bulan	220.000.000	12	bulan	242.000.000	12	bulan	266.200.000	12	bulan	292.820.000	12	bulan	292.820.000			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	1.481.794.088	100	%	1.481.794.088	100	%	1.629.973.497	100	%	1.792.970.846	100	%	1.972.267.931	100	%	2.169.494.724	100	%	2.169.494.724		
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor	20	paket	32.015.000	20	paket	32.015.000	20	paket	35.216.500	20	paket	38.738.150	20	paket	42.611.965	20	paket	46.873.162	20	paket	46.873.162			
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	paket	-	5	paket	-	5	paket	-	5	paket	-	5	paket	-	5	paket	-	5	paket	-			
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	20	paket	4.600.000	20	paket	4.600.000	20	paket	5.060.000	20	paket	5.566.000	20	paket	6.122.600	20	paket	6.734.860	20	paket	6.734.860			
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4	paket kegiatan	291.947.828	4	paket kegiatan	291.947.828	4	paket kegiatan	321.142.611	4	paket kegiatan	353.256.872	4	paket kegiatan	388.582.559	4	paket kegiatan	427.440.815	4	paket kegiatan	427.440.815			
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan ketersediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	36.480.000	12	bulan	36.480.000	12	bulan	40.128.000	12	bulan	44.140.800	12	bulan	48.554.880	12	bulan	53.410.368	12	bulan	53.410.368			
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	1.116.751.260	12	bulan	1.116.751.260	12	bulan	1.228.426.386	12	bulan	1.351.269.025	12	bulan	1.486.395.927	12	bulan	1.635.035.520	12	bulan	1.635.035.520			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	%	607.868.000	100	%	607.868.000	100	%	668.654.800	100	%	735.520.280	100	%	809.072.308	100	%	889.979.539	100	%	889.979.539		
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16	unit	420.000.000	16	unit	420.000.000	16	unit	462.000.000	16	unit	508.200.000	16	unit	559.020.000	16	unit	614.922.000	16	unit	614.922.000			
		1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah ketersediaan mebel kantor	2	paket	132.868.000	2	paket	132.868.000	2	paket	146.154.800	2	paket	160.770.280	2	paket	176.847.308	2	paket	194.532.039	2	paket	194.532.039			
		1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	paket	55.000.000	2	paket	55.000.000	2	paket	60.500.000	2	paket	66.550.000	2	paket	73.205.000	2	paket	80.525.500	2	paket	80.525.500			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	940.906.000	100	%	940.906.000	100	%	1.034.996.600	100	%	1.138.496.260	100	%	1.252.345.886	100	%	1.377.580.475	100	%	1.377.580.475		
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan ketersediaan jasa surat menyurat	12	bulan	24.000.000	12	bulan	24.000.000	12	bulan	26.400.000	12	bulan	29.040.000	12	bulan	31.944.000	12	bulan	35.138.400	12	bulan	35.138.400			
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	916.906.000	12	bulan	916.906.000	12	bulan	1.008.596.600	12	bulan	1.109.456.260	12	bulan	1.220.401.886	12	bulan	1.342.442.075	12	bulan	1.342.442.075			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	1.080.891.500	100	%	1.080.891.500	100	%	1.188.980.650	100	%	1.307.878.715	100	%	1.438.666.587	100	%	1.582.533.245	100	%	1.582.533.245		
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	508.400.000	12	bulan	508.400.000	12	bulan	559.240.000	12	bulan	615.164.000	12	bulan	676.680.400	12	bulan	744.348.440	12	bulan	744.348.440			
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	12	bulan	281.873.500	12	bulan	281.873.500	12	bulan	310.060.850	12	bulan	341.066.935	12	bulan	375.173.629	12	bulan	412.690.991	12	bulan	412.690.991			
		1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	12	bulan	290.618.000	12	bulan	290.618.000	12	bulan	319.679.800	12	bulan	351.647.780	12	bulan	386.812.558	12	bulan	425.493.814	12	bulan	425.493.814			

*Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026*

Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paripatisasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	84,65	85,25	%	62.568.847.307	85,85	%	62.568.847.307	86,45	%	100.124.990.507	87,05	%	105.669.325.387	87,65	%	110.006.168.942	88,25	%	115.861.444.294	88,25	%	517.763.268.437			
					90,09	91,59	%	27.336.985.307	91,59	%	27.336.985.307	93,09	%	27.327.061.907	94,59	%	27.299.363.727	96,09	%	27.299.363.727	96,09	%	27.299.363.727	97,59	%	27.291.246.266	97,59	%	136.652.578.123
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat paripatisasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,59	%	27.336.985.307	91,59	%	27.336.985.307	93,09	%	27.327.061.907	94,59	%	27.299.363.727	96,09	%	27.299.363.727	96,09	%	27.299.363.727	97,59	%	27.291.246.266	97,59	%	136.652.578.123
		1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		1	sekolah	1.064.000.000	1	sekolah	1.064.000.000	1	sekolah	1.170.400.000	1	sekolah	1.276.800.000,00	1	sekolah	1.383.200.000,00	1	sekolah	1.489.600.000,00	5	usb	6.384.000.000			
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunan Ruang Kelas Baru		2	sekolah	479.000.000	2	sekolah	479.000.000	2	sekolah	526.900.000	2	sekolah	574.800.000,00	2	sekolah	526.900.000,00	1	sekolah	242.000.000,00	9	ruang kelas	2.349.600.000			
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2	sekolah	479.000.000	2	sekolah	479.000.000	1	sekolah	247.000.000	1	sekolah	271.700.000,00	1	sekolah	298.870.000,00	1	sekolah	328.757.000,00	6	ruang Guru/Ke	1.625.327.000			
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		4	sekolah	988.000.000	4	sekolah	988.000.000	4	sekolah	988.000.000	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	17	sekolah	4.199.000.000			
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah		4	sekolah	943.000.000	4	sekolah	943.000.000	4	sekolah	943.000.000	4	sekolah	943.000.000,00	4	sekolah	943.000.000,00	4	sekolah	943.000.000,00	20	perpustakaan	4.715.000.000			
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10	sekolah	2.470.000.000	10	sekolah	2.470.000.000	10	sekolah	#####	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	50	sekolah	12.350.000.000			
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah		1	sekolah	271.000.000	1	sekolah	271.000.000	1	sekolah	271.000.000	1	sekolah	271.000.000,00	1	sekolah	271.000.000,00	1	sekolah	271.000.000,00	5	sekolah	1.355.000.000			
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi sedang/berat		8	sekolah	1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000	8	sekolah	1.976.000.000,00	8	sekolah	1.976.000.000,00	8	sekolah	1.976.000.000,00	40	sekolah	9.880.000.000			
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat		4	sekolah	760.000.000	4	sekolah	760.000.000	4	sekolah	760.000.000	4	sekolah	760.000.000,00	4	sekolah	760.000.000,00	4	sekolah	760.000.000,00	20	sekolah	3.800.000.000			
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		5	sekolah	900.000.000	5	sekolah	900.000.000	5	sekolah	900.000.000	5	sekolah	900.000.000,00	5	sekolah	900.000.000,00	5	sekolah	900.000.000,00	25	sekolah	4.500.000.000			
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		4	sekolah	756.000.000	4	sekolah	756.000.000	4	sekolah	756.000.000	4	sekolah	756.000.000,00	4	sekolah	756.000.000,00	4	sekolah	756.000.000,00	20	sekolah	3.780.000.000			
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas sekolah yang direhab		12	sekolah	2.214.800.000	12	sekolah	2.214.800.000	12	sekolah	2.214.800.000	12	sekolah	2.214.800.000,00	12	sekolah	2.214.800.000,00	12	sekolah	2.214.800.000,00	60	sekolah	11.074.000.000			
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/Perjaga Sekolah yang direhab		1	sekolah	190.000.000	1	sekolah	190.000.000	1	sekolah	190.000.000	1	sekolah	190.000.000,00	1	sekolah	190.000.000,00	1	sekolah	190.000.000,00	5	sekolah	950.000.000			
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan Mebelir sekolah		1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000,00	1794	unit/paket	1.528.000.000,00	1794	unit/paket	1.528.000.000,00	8.970	Unit/paket	7.640.000.000			
		1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000,00	300	Buah	300.000.000,00	300	Buah	300.000.000,00	1.500	Buah	1.500.000.000			
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000,00	53	Unit	595.000.000,00	53	Unit	595.000.000,00	265	Unit	2.975.000.000			
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport k 13 SD yang sedakan		3900	eksemplar	196.400.000	3900	eksemplar	196.400.000	4017	eksemplar	202.292.000	4137,5	eksemplar	208.360.760,00	4262	eksemplar	214.611.582,80	4389	eksemplar	221.049.930,28	20706	eksemplar	1.042.714.273			
		1.01.02.2.01.18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan biaya sekolah/beasiswa		648	Orang	324.000.000	648	Orang	324.000.000	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00			
		1.01.02.2.01.19	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		176	sekolah	44.840.000	176	sekolah	44.840.000	176	sekolah	44.840.000	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	224.200.000			
		1.01.02.2.01.20	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan (DS dan akreditasi) sekolah		176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	448.400.000			
		1.01.02.2.01.21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional																									
		1.01.02.2.01.22	Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																										
		1.01.02.2.01.23	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang mendapatkan pelatihan pengembangan karir		2	Kegiatan	54.846.000	2	Kegiatan	54.846.000	2	Kegiatan	60.330.600	2,06	Kegiatan	66.363.660,00	2	Kegiatan	73.000.026,00	2	Kegiatan	80.300.028,60	10	Kegiatan	334.840.315			
		1.01.02.2.01.24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		10	sekolah	71.000.000	10	sekolah	71.000.000	10	sekolah	71.000.000	10	sekolah	71.000.000,00	10	sekolah	71.000.000,00	10	sekolah	71.000.000,00	50	sekolah	355.000.000			
		1.01.02.2.01.25	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang terbth pengelolaan Dana BOS		175	sekolah	10.642.419.307	175	sekolah	10.642.419.307	176	sekolah	10.698.819.307	177	sekolah	10.727.019.307,00	177	sekolah	10.727.019.307,00	178	sekolah	10.755.219.307,00	178	sekolah	53.550.496.535			

*Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulangan Tahun 2021 - 2026*

1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	67,65	%	17.107.200.000	67,65	%	17.107.200.000	68,75	%	46.730.032.000	69,85	%	50.594.632.000	70,95	%	53.109.632.000	72,05	%	56.864.632.000	72,05	%	244.664.690.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		1		Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc dan sanitasi	1.500.000.000	1		Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc dan sanitasi	1.500.000.000	1		Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc dan sanitasi	2.000.000.000	1		Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc dan sanitasi	3.000.000.000	1		Gedung Kantor Ruang Kelas Toilet/wc dan sanitasi	3.500.000.000	5		12.500.000.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1		Paving Block	800.000.000	1		Paving Block	800.000.000	1		Paving Block	1.200.000.000	1		Paving Block	2.000.000.000	1		Paving Block	2.400.000.000	5		8.000.000.000
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah		2		Rehab Ruang	450.000.000	2		Rehab Ruang	450.000.000	2		Rehab Ruang	450.000.000	2		Rehab Ruang	450.000.000	2		Rehab Ruang	450.000.000	10		2.250.000.000
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang direhab		2		Lembaga PAUD	200.000.000	2		Lembaga PAUD	200.000.000	2		Lembaga PAUD	400.000.000	2		Lembaga PAUD	800.000.000	2		Lembaga PAUD	1.000.000.000	10		3.000.000.000
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																							0		-
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																							0		-
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD		5		Lembaga PAUD	150.000.000	5		Lembaga PAUD	150.000.000	5		Lembaga PAUD	150.000.000	5		Lembaga PAUD	150.000.000	5		Lembaga PAUD	150.000.000	25		750.000.000
1.01.02.2.03.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		5		Lembaga PAUD	250.000.000	5		Lembaga PAUD	250.000.000	5		Lembaga PAUD	250.000.000	5		Lembaga PAUD	250.000.000	5		Lembaga PAUD	250.000.000	25		1.250.000.000
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD		10		lembaga PAUD	550.000.000	10		lembaga PAUD	550.000.000	10		10 lembaga	550.000.000	10		10 lembaga	550.000.000	10		10 lembaga	550.000.000	50		2.750.000.000
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		6420	anak		963.000.000	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	6420	anak	963.000.000	32100	anak		4.815.000.000
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima bantuan biaya		274	anak		164.400.000	274	anak	164.400.000	300	anak	180.000.000	325	anak	195.000.000	350	anak	210.000.000	400	anak	240.000.000	1649	anak		989.400.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		30	pkt		300.000.000	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	30	pkt	300.000.000	150	pkt		1.500.000.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima biaya untuk penyelenggaraan proses belajar		8	TKN, SKB ,Rumpin		430.000.000	8	TKN, SKB ,Rumpin	430.000.000	8	TKN, SKB ,Rumpin	430.000.000	8	TKN, SKB ,Rumpin	430.000.000	8	TKN, SKB ,Rumpin	430.000.000	8	TKN, SKB ,Rumpin	430.000.000	40	TKN, SKB ,Rumpin		2.150.000.000
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDS dan akreditasi sekolah		6	kegiatan		1.400.000.000	6	kegiatan	1.400.000.000	6	kegiatan	1.600.000.000	6	kegiatan	1.750.000.000	6	kegiatan	1.870.000.000	6	kegiatan	1.990.000.000	30	kegiatan		8.610.000.000
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang menerima bantuan biaya insentif		583	orang		5.596.800.000	583	orang	5.596.800.000	600	orang	6.296.400.000	600	orang	6.996.000.000	600	orang	6.996.000.000	600	orang	6.996.000.000	2983	orang		32.881.200.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang mengikuti pelatihan		221	org		160.000.000	221	org	160.000.000	225	org	160.000.000	225	org	160.000.000	225	org	160.000.000	225	org	160.000.000	1121	org		800.000.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah		221	lbg		120.000.000	221	lbg	120.000.000	221	lbg	120.000.000	221	lbg	120.000.000	221	lbg	120.000.000	221	lbg	120.000.000	1105	lbg		600.000.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa/sekolah yang mendapatkan bantuan biaya BOP PAUD		6420	anak		4.073.000.000	6420	anak	4.073.000.000	6500	anak	4.121.000.000	6700	anak	4.241.000.000	7000	anak	4.421.000.000	7500	anak	4.721.000.000	34120	anak		21.577.000.000

	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan	80,25	81,75	%	8.917.316.000	81,75	%	8.917.316.000	83,45	%	16.192.316.000	85,15	%	17.652.316.000	86,85	%	18.742.316.000	88,55	%	20.312.316.000	90,25	%	85.090.510.000											
	1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	2	PKBM		400.000.000	2	PKBM	400.000.000	2	PKBM	400.000.000	2	PKBM	400.000.000	2	PKBM	400.000.000	3	PKBM	600.000.000	11	PKBM	2.200.000.000											
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2	PKBM		200.000.000	2	PKBM	200.000.000	2	PKBM	200.000.000	2	PKBM	200.000.000	2	PKBM	200.000.000	3	PKBM	300.000.000	11	PKBM	1.100.000.000											
	1.01.02.2.04.03	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan Meubeler PKBM	2	PKBM		50.000.000	2	PKBM	50.000.000	2	PKBM	50.000.000	2	PKBM	50.000.000	2	PKBM	50.000.000	3	PKBM	75.000.000	11	PKBM	275.000.000											
	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan untuk PKBM	12	PKBM/SKB		180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	12	PKBM/SKB	180.000.000	60	PKBM/SKB	900.000.000											
	1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-												
	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-												
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Proses Belajar PKBM/SKB	12	PKBM/SKB		1.546.516.000	12	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	PKBM/SKB	1.546.516.000	12	PKBM/SKB	7.732.580.000											
	1.01.02.2.04.13	Penyisipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan MAU, CTK, Lomba lomba Tutor/Pamong Belajar dan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Pokjar Kesetaraan	4	Kegiatan		850.000.000	4	Kegiatan	850.000.000	4	Kegiatan	950.000.000	4	Kegiatan	970.000.000	4	Kegiatan	980.000.000	4	Kegiatan	990.000.000	20	Kegiatan	4.740.000.000											
	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang menerima insentif Pongpes/madin dan instruktur LKP	357	orang		1.782.000.000	357	orang	1.782.000.000	357	orang	1.782.000.000	357	orang	1.782.000.000	357	orang	1.782.000.000	357	orang	1.782.000.000	1785	orang	8.910.000.000											
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pelatihan penyelenggara, tutor dan instruktur	52	PKBM/SKB, LKP		220.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	220.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	220.000.000	260	PKBM/SKB, LKP	1.100.000.000											
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Lembaga PKBM/SKB dan LKP	52	PKBM/SKB, LKP		150.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	150.000.000	52	PKBM/SKB, LKP	150.000.000	260	PKBM/SKB, LKP	750.000.000											
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan dana Operasional Kesetaraan	12	PKBM/SKB		3.538.800.000	12	PKBM/SKB	3.538.800.000	12	PKBM/SKB	3.538.800.000	12	PKBM/SKB	3.538.800.000	12	PKBM/SKB	3.538.800.000	12	PKBM/SKB	3.538.800.000	60	PKBM/SKB	17.694.000.000											
	1.01.05.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri	100	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000											
	1.01.05.2.02	Pemberitaan Isin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	Persentase ketepatan waktu pemberian hibah uang untuk lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal	100	5,88	%	250.000.000	5,88	%	250.000.000	23,53	%	250.000.000	47,06	%	250.000.000	76,47	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000											
	1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan hibah uang untuk pembinaan	600 gtk	1	Lembaga	250.000.000	1	Lembaga	250.000.000	3	Lembaga	250.000.000	4	Lembaga	250.000.000	5	Lembaga	250.000.000	4	Lembaga	250.000.000	17	Lembaga	250.000.000											
	1.01.04.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang <1 (PAUD, SD dan SMP)	75,36	80,39	80,39	97,04	%	200.000.000	75,36	80,39	97,04	%	200.000.000	75,36	80,39	97,04	%	240.000.000	75,36	80,39	97,04	%	300.000.000	75,36	80,39	97,04	%	360.000.000	75,36	80,39	97,04	%	1.400.000.000		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	%	200.000.000	100	%	200.000.000	100	%	240.000.000	100	%	300.000.000	100	%	300.000.000	100	%	360.000.000	100	%	1.400.000.000											
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang menerima pelatihan peningkatan kompetensi untuk sertifikasi	600 Ptk	600	ptk	100.000.000	650	ptk	100.000.000	700	ptk	Rp 120.000.000	750	ptk	Rp 160.000.000	800	ptk	Rp 140.000.000	850	ptk	Rp 180.000.000	2100	ptk	700.000.000											
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang menerima pelatihan seleksi kepala sekolah	40 Ptk	40	ptk	100.000.000	40	ptk	100.000.000	40	ptk	Rp 120.000.000	40	ptk	Rp 140.000.000	40	ptk	Rp 160.000.000	40	ptk	Rp 180.000.000	70	ptk	700.000.000											

*Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026*

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Meningkatnya Budaya Banggai yang Terlestarikan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	5,88	5,88	%	400.000.000	5,88	%	400.000.000	23,53	%	440.000.000	47,06	%	500.000.000	76,47	%	500.000.000	100	%	560.000.000	100	%	2.400.000.000
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga adat yang dibina dengan baik	5,88	5,88	%	400.000.000	5,88	%	400.000.000	23,53	%	440.000.000	47,06	%	500.000.000	76,47	%	500.000.000	100	%	560.000.000	100	%	2.400.000.000
		2.22.02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		1	Lembaga	100.000.000	1	Lembaga	100.000.000	3	Lembaga	Rp 120.000.000	4	Lembaga	Rp 160.000.000	5	Lembaga	Rp 140.000.000	4	Lembaga	Rp 180.000.000	17	Lembaga	700.000.000
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, lembaga dan pranata yang dibina		30	orang	100.000.000	30	orang	100.000.000	40	orang	Rp 120.000.000	50	orang	Rp 140.000.000	60	orang	Rp 160.000.000	70	orang	Rp 180.000.000	70	orang	700.000.000
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia		1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	5	Buah/Unit	1.000.000.000
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	50	50	%	278.175.000	50	%	278.175.000	62,5	%	420.000.000	75	%	590.000.000	87,5	%	760.000.000	100	%	930.000.000	100	%	2.978.175.000
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat	3	3	grup	278.175.000	3	grup	278.175.000	5	grup	420.000.000	7	grup	590.000.000	9	grup	760.000.000	10	grup	930.000.000	10	grup	2.978.175.000
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		30	orang	178.175.000	30	orang	178.175.000	40	orang	300.000.000	60	orang	450.000.000	70	orang	600.000.000	80	orang	750.000.000	280	orang	2.278.175.000
		2.22.03.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitas tata kelolanya dengan baik		3	grup	100.000.000	3	grup	100.000.000	5	grup	120.000.000	7	grup	140.000.000	9	grup	160.000.000	10	grup	180.000.000	10	grup	700.000.000
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	33,33	33,33	%	344.845.000	33,33	%	344.845.000	50	%	380.000.000	66,667	%	425.000.000	83,33	%	470.000.000	100	%	520.000.000	100	%	2.139.845.000
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	2	2	Kegiatan	344.845.000	2	Kegiatan	344.845.000	3	Kegiatan	380.000.000	4	Kegiatan	425.000.000	5	Kegiatan	470.000.000	6	Kegiatan	520.000.000	6	Kegiatan	2.139.845.000
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota		100	orang	70.000.000	100	orang	70.000.000	120	orang	80.000.000	150	orang	90.000.000	170	orang	100.000.000	200	orang	110.000.000	740	orang	450.000.000
		2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang tersedia		1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	5	Buah	1.000.000.000
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan sejarah		100	orang	74.845.000	100	orang	74.845.000	150	orang	100.000.000	200	orang	135.000.000	250	orang	170.000.000	300	orang	210.000.000	1000	orang	689.845.000
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	66,7	66,7	%	954.870.000	66,7	%	954.870.000	73,33	%	1.045.000.000	80,0	%	1.240.000.000	86,67	%	1.435.000.000	100	%	1.590.000.000	100	%	6.264.870.000
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	100	100	%	450.000.000	100	%	450.000.000	83,33	%	470.000.000	69,6	%	590.000.000	70,37	%	710.000.000	66,67	%	740.000.000	66,67	%	2.960.000.000
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya teregister		15	Buah/Unit	150.000.000	15	Buah/Unit	150.000.000	18	Buah/Unit	170.000.000	23	Buah/Unit	190.000.000	27	Buah/Unit	210.000.000	30	Buah/Unit	240.000.000	30	Buah/Unit	960.000.000
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan		15	Buah/Unit	300.000.000	15	Buah/Unit	300.000.000	15	Buah/Unit	300.000.000	16	Buah/Unit	400.000.000	19	Buah/Unit	500.000.000	20	Buah/Unit	500.000.000	20	Buah/Unit	2.000.000.000
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	66,7	66,7	%	504.870.000	66,7	%	504.870.000	73,333	%	575.000.000	80	%	650.000.000	86,67	%	725.000.000	100	%	850.000.000	100	%	3.304.870.000
		2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi		10	Buah/Unit	258.000.000	10	Buah/Unit	258.000.000	11	Buah/Unit	300.000.000	12	Buah/Unit	350.000.000	13	Buah/Unit	400.000.000	15	Buah/Unit	500.000.000	15	Buah/Unit	1.808.000.000
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dikembangkan		1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	5	Buah/Unit	1.000.000.000
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan		2	Buah/Unit	46.870.000	2	Buah/Unit	46.870.000	3	Buah/Unit	75.000.000	4	Buah/Unit	100.000.000	5	Buah/Unit	125.000.000	6	Buah/Unit	150.000.000	6	Buah/Unit	496.870.000
			Jumlah					234.102.182.669			234.102.182.669			288.915.980.403			313.591.914.271			338.800.516.712			367.658.726.840			780.783.440.963

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada pembahasn ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA									
Misi Ke-3 : "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan"									
Tujuan Menigkatnya Indeks Pendidikan									
INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
1	Angka rata-rata lama sekolah	7,55	7,82	8,09	8,36	8,63	8,9	9,17	9,17
	angka Harapan lama sekolah	12,46	12,59	12,72	12,85	12,98	13,11	13,24	13,24
Misi Ke-5 : "Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif"									
Tujuan Menigkatnya Pelestarian Budaya Asli Balangan									
INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
2	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	52	58	68	81	87	100	100

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan 2021-2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan. Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Balangan untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama.
2. Adanya komitmen seluruh jajaran pendidikan untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, mudah mudahan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Balangan dan OPD serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Balangan 2021-2026 tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan

untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Balangan khususnya dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
			1.01.01.2.011.02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atas Lapangan	Jumlah ketersediaan Kenderaan Dinas Operasional atas Lapangan	16	unit	105.000.000	16	unit	-	16	unit	-	16	unit	-	16	unit	-	16	unit	614.922.000						
			1.01.01.2.011.05	Pengadaan Mebel	Jumlah ketersediaan mebel kantor	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	194.532.039						
			1.01.01.2.011.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	paket	147.600.000	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	-	2	paket	80.525.500						
			5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Jasa Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	478.160.500	100	%	1.086.915.260	100	%	1.195.606.786	100	%	1.315.167.465	100	%	1.446.684.211	100	%	1.591.352.632	100	%	1.377.580.475		
			1.01.01.2.081.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan ketersediaan jasa surat menyurat	12	bulan	4.250.000	12	bulan	217.916.260	12	bulan	239.707.886	12	bulan	263.678.675	12	bulan	290.046.542	12	bulan	319.051.196	12	bulan	35.138.400			
			1.01.01.2.081.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	12	bulan	473.910.500	12	bulan	868.999.000	12	bulan	955.898.900	12	bulan	1.051.488.790	12	bulan	1.156.637.669	12	bulan	1.272.301.436	12	bulan	1.342.442.075			
			1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	766.371.711,10	100	%	1.336.588.000	100	%	1.195.246.800	100	%	1.314.771.480	100	%	1.446.248.628	100	%	1.590.873.491	100	%	1.582.533.245		
			1.01.01.2.091.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	12	bulan	240.500.000	12	bulan	484.150.000	12	bulan	532.565.000	12	bulan	585.821.500	12	bulan	644.403.650	12	bulan	708.844.015	12	bulan	744.348.440			
			1.01.01.2.091.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	12	bulan	200.455.000	12	bulan	280.373.500	12	bulan	308.410.850	12	bulan	339.251.935	12	bulan	373.177.129	12	bulan	410.494.841	12	bulan	412.690.991			
			1.01.01.2.091.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	12	bulan	134.689.250	12	bulan	322.064.500	12	bulan	354.270.950	12	bulan	389.698.045	12	bulan	428.667.850	12	bulan	471.534.634	12	bulan	425.493.814			
			1.01.01.2.091.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	gedung	190.727.461,10	2	gedung	250.000.000	2	gedung	275.000.000	2	gedung	302.500.000	2	gedung	332.750.000	2	gedung	366.025.000	2	gedung	1.717.002.461			
			1.01.02	PROGRAM PENGELUARAN PERIODIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-13 tahun dalam pendidikan dasar	84,65	85,25	%	45.733.102.350	85,85	%	68.196.076.260	86,45	%	104.035.221.057	87,05	%	109.937.055.937	87,65	%	114.273.899.492	88,25	%	120.129.174.844	88,25	%	516.066.595.390		
			5.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	91,59	%	17.729.369.000	91,59	%	29.957.161.450	93,09	%	28.527.061.907	94,59	%	28.499.363.727	96,09	%	28.597.920.916	97,59	%	28.491.246.266	97,59	%	139.037.454.266		
			1.01.02.2.011.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	sekolah (SDK Singingari)	-	1	sekolah (SDK Singingari)	-	1	lah (SDK Rara)	1.170.400.000	1	sekolah (SD Sum ber Agung, Halong)	1.276.800.000,00	1	sekolah (SDK Nanas)	1.383.200.000,00	1	sekolah	1.489.600.000,00	5	usb	5.320.000.000			
			1.01.02.2.011.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunan Ruang Kelas Baru	2	sekolah	200.000.000	2	sekolah	721.350.000	2	sekolah	526.900.000	2	sekolah	574.800.000,00	2	sekolah	526.900.000,00	1	sekolah	242.000.000,00	9	ruang kelas	2.591.950.000			
			1.01.02.2.011.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2	sekolah	100.000.000	2	sekolah	221.350.000	1	sekolah	247.000.000	1	sekolah	271.700.000,00	1	sekolah	298.870.000,00	1	sekolah	328.757.000,00	6	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.367.677.000			
			1.01.02.2.011.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	sekolah	-	4	sekolah	-	4	sekolah	988.000.000	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	3	sekolah	741.000.000,00	17	sekolah	3.211.000.000			
			1.01.02.2.011.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4	sekolah	-	4	sekolah	-	4	sekolah	943.000.000	4	sekolah	943.000.000,00	4	sekolah	943.000.000,00	4	sekolah	943.000.000,00	20	perpustakaan	3.772.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah													
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20				
			1.01.02.2.01.04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10	sekolah	962.300.000	10	sekolah	657.300.000	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	10	sekolah	2.470.000.000,00	50	sekolah	10.537.300.000					
			1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah	1	Sekolah	-	1	Sekolah	-	1	Sekolah	271.000.000	1	Sekolah	271.000.000	1	Sekolah	271.000.000	1	Sekolah	271.000.000	5	Sekolah	1.084.000.000					
			1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi sedang/berat	8	Sekolah	7.946.074.000	8	Sekolah	1.706.750.000	8	Sekolah	1.976.000.000	8	Sekolah	1.976.000.000	8	Sekolah	1.976.000.000	8	Sekolah	1.976.000.000	40	Sekolah	9.610.750.000					
			1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat	4	Sekolah	-	4	Sekolah	221.350.000	4	Sekolah	760.000.000	4	Sekolah	760.000.000	4	Sekolah	760.000.000	4	Sekolah	760.000.000	20	Sekolah	3.261.350.000					
			1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	5	Sekolah	-	5	Sekolah	-	5	Sekolah	900.000.000	5	Sekolah	900.000.000	5	Sekolah	900.000.000	5	Sekolah	900.000.000	25	Sekolah	3.600.000.000					
			1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Gedung/Berat Perputakaan Sekolah	Jumlah perputakaan sekolah yang direhabilitasi	4	Sekolah	-	4	Sekolah	-	4	Sekolah	756.000.000	4	Sekolah	756.000.000	4	Sekolah	756.000.000	4	Sekolah	756.000.000	20	Sekolah	3.024.000.000					
			1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi	12	Sekolah	49.500.000	12	Sekolah	-	12	Sekolah	2.214.800.000	12	Sekolah	2.214.800.000	12	Sekolah	2.214.800.000	12	Sekolah	2.214.800.000	60	Sekolah	8.859.200.000					
			1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah yang direhabilitasi	1	Sekolah	-	1	Sekolah	-	1	Sekolah	190.000.000	1	Sekolah	190.000.000	1	Sekolah	190.000.000	1	Sekolah	190.000.000	5	sekolah	760.000.000					
			1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan Mebelr sekolah	1794	unit/paket	-	1794	unit/paket	-	1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000	1794	unit/paket	1.528.000.000	8.970	Unit/paket	6.112.000.000					
			1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	300	Buah	-	300	Buah	-	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	300	Buah	300.000.000	1.500	Buah	1.200.000.000					
			1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Sekolah	53	Unit	120.900.000	53	Unit	-	53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000	53	Unit	595.000.000	265	Unit	2.380.000.000					
			1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah raport k. 13 SD yang sedikan	3900	eksemplar	315.325.000	3900	eksemplar	101.400.000	4017	eksemplar	202.292.000	4137,5	eksemplar	208.360.760,00	4262	eksemplar	214.611.582,80	4389	eksemplar	221.049.930,28	20706	eksemplar	947.714.273					
			1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang mendapatkan bantuan biaya sekolah/basisiwa	648	Orang	329.500.000	648	Orang	581.500.000	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	324.000.000,00	648	Orang	1.877.500.000		
			1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi APE Siswa	5	Sekolah	1.380.600.000	5	Sekolah	1.000.000.000	5	Sekolah	1.000.000.000	5	Sekolah	1.000.000.000	5	Sekolah	1.000.000.000	5	Sekolah	1.000.000.000	50	Sekolah	1.000.000.000					
			1.01.02.2.01.23	Peningkatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan sosialisi Peningkatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	176	sekolah	307.440.000	176	sekolah	28.400.000	176	sekolah	44.840.000	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	44.840.000,00	176	sekolah	207.760.000		
			1.01.02.2.01.24	Penyangan dan Tindak Lanjut Evakuasi Selama Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan ESD dan alokasian sekolah	176	sekolah	-	176	sekolah	56.800.000	176	sekolah	89.680.000	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	89.680.000,00	176	sekolah	415.520.000		
			1.01.02.2.01.25	Pembinaan Moral, Bakti dan Keagamaan Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional	100	siswa	79.300.000	200	siswa	435.300.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000	200	siswa	200.000.000		
			1.01.02.2.01.26	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar																											
			1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Tahun Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang mendapatkan pelatihan pengembangan karir	2	Kegiatan	187.680.000	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	60.330.600	2	Kegiatan	66.363.660,00	2	Kegiatan	73.000.026,00	2	Kegiatan	80.300.028,60	10	Kegiatan	279.994.315					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah													
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
			1.01.02.2.01.20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	10	Sekolah	5.750.750.000	10	Sekolah	10.901.100.000	10	Sekolah	71.000.000	10	Sekolah	71.000.000	10	Sekolah	71.000.000	10	Sekolah	71.000.000	50	Sekolah	11.185.100.000					
			1.01.02.2.01.20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang terbantu pengelolaan Dana BOS	175	sekolah	-	175	sekolah	13.324.561.450	176	sekolah	10.698.819.307	177	sekolah	10.727.019.307,00	177	sekolah	10.727.019.307,00	178	sekolah	10.755.219.307,00	178	Sekolah	56.232.638.678					
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 15-17 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	74,56	%	16.757.878.350	74,56	%	17.805.272.550	76,26	%	10.852.411.150	77,96	%	11.457.344.210	79,66	%	12.090.630.576	81,36	%	12.727.580.579	83,06	%	61.285.916.865				
			1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah gedung untuk unit sekolah yang dibangun				3	gedung	950.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000	1	gedung	200.000.000		
			1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	1	kelas	500.691.100	1	kelas	-	1	kelas	263.450.000	1	kelas	287.400.000,00	1	kelas	311.350.000,00	1	kelas	335.300.000,00	5	kelas	1.197.500.000					
			1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	sekolah	-	1	sekolah	-	1	sekolah	263.450.000	1	sekolah	287.400.000,00	1	sekolah	311.350.000,00	1	sekolah	335.300.000,00	5	Sekolah	1.197.500.000					
			1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	sekolah	-	1	sekolah	-	1	sekolah	271.700.000	1	sekolah	296.400.000	1	sekolah	320.350.000,00	1	sekolah	344.300.000,00	5	Sekolah	1.232.750.000					
			1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi Perpustakaan Sekolah	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550	2	sekolah	549.330.550					
			1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium SAMP	1	sekolah	933.272.150	1	sekolah	-	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	1	sekolah	357.500.000	2	Sekolah	1.430.000.000					
			1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	2	sekolah	-	2	sekolah	-	2	sekolah	517.000.000	2	sekolah	564.000.000	2	sekolah	611.000.000	2	sekolah	611.000.000	10	Sekolah	2.303.000.000					
			1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir	1	sekolah	-	1	sekolah	-	1	sekolah	263.450.000	1	sekolah	287.400.000,00	1	sekolah	311.350.000,00	1	sekolah	335.300.000,00	5	Sekolah	1.197.500.000					
			1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah	4	sekolah	-	4	sekolah	-	4	sekolah	279.400.000	3	sekolah	298.450.000	3	sekolah	317.500.000	3	sekolah	336.550.000	17	Sekolah	1.231.900.000					
			1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	sekolah	720.000.000	4	sekolah	-	4	sekolah	1.086.800.000	4	sekolah	1.185.600.000	4	sekolah	1.284.400.000	4	sekolah	1.383.200.000	20	Sekolah	4.940.000.000					
			1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhabilitasi	2	sekolah	-	2	sekolah	-	2	sekolah	415.800.000	2	sekolah	453.600.000	2	sekolah	491.400.000	2	sekolah	529.200.000	10	Sekolah	1.890.000.000					
			1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	3	sekolah	1.462.249.550	3	sekolah	-	3	sekolah	815.100.000	3	sekolah	889.200.000	3	sekolah	963.300.000	3	sekolah	1.037.400.000	15	Sekolah	3.705.000.000					
			1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhabilitasi	2	sekolah	588.503.250	2	sekolah	-	2	sekolah	132.000.000	2	sekolah	144.000.000	2	sekolah	156.000.000	2	sekolah	168.000.000	10	Sekolah	600.000.000					
			1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	2	sekolah	141.473.000	2	sekolah	-	2	sekolah	330.000.000	2	sekolah	360.000.000	2	sekolah	390.000.000	2	sekolah	420.000.000	10	Sekolah	1.500.000.000					
			1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	1	sekolah	424.419.000	1	sekolah	-	1	sekolah	207.900.000	1	sekolah	226.800.000	1	sekolah	245.700.000	1	sekolah	264.600.000	5	Sekolah	945.000.000					
			1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Gedung/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi	2	sekolah	551.611.250	2	sekolah	75.000.000	2	sekolah	473.000.000	2	sekolah	516.000.000	1	sekolah	537.500.000	1	sekolah	559.000.000	8	Sekolah	2.160.500.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
		1.01.02.2.02.19	Rahibalisasi Gedung/Berat Ruang Serba Guna/Hala yang dirubah	Jumlah Ruang Serba Guna/Hala yang dirubah		1	sekolah	-	1	sekolah	-	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	1	sekolah	175.000.000	5	Sekolah	700.000.000		
		1.01.02.2.02.21	Rahibalisasi Gedung/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah yang dirubah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Peraga Sekolah yang dirubah		1	sekolah	-	1	sekolah	-	1	sekolah	181.500.000	1	sekolah	198.000.000	1	sekolah	214.500.000	1	sekolah	231.000.000	5	Sekolah	825.000.000		
		1.01.02.2.02.22	Rahibalisasi Gedung/Berat Fasilitas Pabrik	Jumlah Fasilitas Pabrik yang dirubah		2	sekolah	-	2	sekolah	-	2	sekolah	167.200.000	2	sekolah	182.400.000	2	sekolah	197.600.000	2	sekolah	212.800.000	10	Sekolah	760.000.000		
		1.01.02.2.02.24	Rahibalisasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirubah		4	sekolah	1.100.950.500	4	sekolah	-	4	sekolah	495.000.000	4	sekolah	540.000.000	4	sekolah	585.000.000	4	sekolah	630.000.000	20	Sekolah	2.250.000.000		
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		2	sekolah	-	2	sekolah	-	2	sekolah	385.000.000	2	sekolah	420.000.000	2	sekolah	455.000.000	2	sekolah	490.000.000	10	Sekolah	1.750.000.000		
		1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alet Rumah Tangga Sekolah																									
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perengkapan Sekolah		4	sekolah	-	4	sekolah	-	4	sekolah	660.000.000	4	sekolah	720.000.000	4	sekolah	780.000.000	4	sekolah	840.000.000	20	Sekolah	3.000.000.000		
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perengkapan Siswa		2000	eks	-	2000	eks	-	2000	eks	75.000.000	2000	eks	75.000.000	2000	eks	75.000.000	2000	eks	75.000.000	10000	eks	300.000.000		
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima bantuan beasiswa pendidikan		750	org	6.600.750.000	750	org	5.911.350.000	750	org	850.000.000	750	org	850.000.000	750	org	850.000.000	750	org	850.000.000	3750	org	9.311.350.000		
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alet Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi APE siswa		3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000	3	sekolah	427.500.000			2.137.500.000		
		1.01.02.2.02.36	Peningkatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Peningkatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		3	Kegiatan	242.380.000	3	Kegiatan	93.650.000	3	Kegiatan	250.000.000	3	Kegiatan	250.000.000	3	Kegiatan	250.000.000	3	Kegiatan	250.000.000	15	Kegiatan	1.093.650.000		
		1.01.02.2.02.37	Pemajaan dan Tidak Lajut Evaluasi Tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan kegiatan pelatihan EDI dan akreditasi sekolah		25	Sekolah	108.570.000	25	Sekolah	24.400.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	175.000.000	25	Sekolah	724.400.000		
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Moral, Bakti dan Keaktifan Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba tingkat Provinsi dan Nasional		26	Sekolah	198.728.000	26	Sekolah	311.392.000	26	Sekolah	475.000.000	26	Sekolah	475.000.000	26	Sekolah	475.000.000	26	Sekolah	475.000.000	130	Sekolah	2.211.392.000		
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan karir		2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	-	2	Kegiatan	60.330.600	2,06	Kegiatan	66.363.660,00	2	Kegiatan	73.000.026,00	2	Kegiatan	80.300.028,60	10	Kegiatan	279.994.315		
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		5	Kegiatan	2.207.450.000	5	Kegiatan	4.627.800.000	5	Kegiatan	175.000.000	5	Kegiatan	175.000.000	5	Kegiatan	175.000.000	5	Kegiatan	175.000.000	25	Kegiatan	5.327.800.000		
		1.01.02.2.02.42	Pengadaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang terbantu pengalangan Dana BOS		1	Aplikasi untuk semua SMP		1	Aplikasi untuk semua SMP	4.334.850.000													1	Aplikasi	4.334.850.000		
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengalangan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengalangan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	Kegiatan		1	Kegiatan	-	2	Kegiatan	75.000.000	1	Kegiatan	25.000.000	1	Kegiatan	25.000.000	2	Kegiatan	75.000.000	6	Kegiatan	200.000.000		
3.01.02.2.03			Pengalangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 3-6 tahun dalam PAUD	68,55	67,65	%	5.711.755.000	67,65	%	15.775.342.260	68,75	%	47.885.632.000	69,85	%	51.750.232.000	70,95	%	54.265.232.000	72,05	%	58.020.232.000	72,05	%	235.608.420.260		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					2	Kegiatan	65.120.000	2	Kegiatan	65.120.000	2	Kegiatan	65.120.000	2	Kegiatan	65.120.000	2	Kegiatan	65.120.000	2	Kegiatan	65.120.000			
		1.01.05.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat	Meningkatkan Pemetaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat yang mandiri	100	100	%	205.000.000	100	%	205.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000			
		1.01.05.2.02	Penelitian dan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat	Perencanaan kegiatan untuk pemberian bimbingan untuk meningkatkan kualitas PAUD dan Pendidikan Nonformal	100	5,88	%	205.000.000	5,88	%	205.000.000	23,53	%	250.000.000	47,06	%	250.000.000	76,47	%	250.000.000	100	%	250.000.000	100	%	250.000.000			
		1.01.05.2.03.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimbingan untuk pembinaan	600	gk	1	Lembaga	205.000.000	1	Lembaga	205.000.000	3	Lembaga	250.000.000	4	Lembaga	250.000.000	5	Lembaga	250.000.000	4	Lembaga	250.000.000	17	Lembaga	250.000.000		
		1.01.04.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang vt (PAUD, SD dan SMP)	75,36 80,39 97,04	%	67.000.000	75,36 80,39 97,04	%	695.770.000	75,36 80,39 97,04	%	240.000.000	75,36 80,39 97,04	%	300.000.000	75,36 80,39 97,04	%	300.000.000	75,36 80,39 97,04	%	360.000.000	75,36 80,39 97,04	%	1.895.770.000				
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Mutakhir	Perentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Mutakhir	100	100	%	67.000.000	100	%	695.770.000	100	%	240.000.000	100	%	300.000.000	100	%	300.000.000	100	%	360.000.000	100	%	1.895.770.000			
		1.01.04.2.01.01	Perbaikan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Mutakhir	Jumlah guru yang menerima pelatihan peningkatan kompetensi untuk sertifikasi	600	gk	600	gk	52.000.000	600	gk	238.070.000	700	gk	Rp 120.000.000	700	gk	Rp 160.000.000	800	gk	Rp 140.000.000	800	gk	Rp 180.000.000	2100	gk	838.070.000		
		1.01.04.2.01.02	Peningkatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Mutakhir	Jumlah guru yang menerima pelatihan untuk kepala sekolah	40	gk	40	gk	15.000.000	40	gk	457.700.000	40	gk	Rp 120.000.000	40	gk	Rp 140.000.000	40	gk	Rp 160.000.000	40	gk	Rp 180.000.000	70	gk	1.057.700.000		
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAWANAN	Perentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan kebudayaan	5,88	5,88	%	-	5,88	%	-	23,53	%	440.000.000	47,06	%	500.000.000	76,47	%	500.000.000	100	%	560.000.000	100	%	2.000.000.000			
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Berprestasi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Perentase Lembaga adat yang dibina dengan baik	5,88	5,88	%	-	5,88	%	-	23,53	%	440.000.000	47,06	%	500.000.000	76,47	%	500.000.000	100	%	560.000.000	100	%	2.000.000.000			
		2.22.02.2.03.01	Perkembangan, Pengembangan, Pemertanian, dan Pemanfaatan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina/dibina/dibina/dibina/dibina/dibina	1	Lembaga	-	1	Lembaga	-	3	Lembaga	Rp 120.000.000	4	Lembaga	Rp 160.000.000	5	Lembaga	Rp 140.000.000	4	Lembaga	Rp 180.000.000	17	Lembaga	600.000.000				
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, lembaga, dan prasarana yang dibina	30	orang	-	30	orang	-	40	orang	Rp 120.000.000	50	orang	Rp 140.000.000	60	orang	Rp 160.000.000	70	orang	Rp 180.000.000	70	orang	600.000.000				
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	1	Buah/Unit	Rp 200.000.000	5	Buah/Unit	800.000.000				
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAWANAN TRADISIONAL	Perentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/jendukung pertunjukan seni	50	50	%	1.188.483.000	50	%	1.188.483.000	62,5	%	420.000.000	75	%	590.000.000	87,5	%	760.000.000	100	%	930.000.000	100	%	2.878.175.000			
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Kabupaten/ Kota	Jumlah mega event kebudayaan yang dilaksanakan dengan baik dan berdampak langsung pada masyarakat	3	grup	1.188.483.000	3	grup	1.188.483.000	5	grup	420.000.000	7	grup	590.000.000	9	grup	760.000.000	10	grup	930.000.000	10	grup	2.878.175.000				
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	30	orang	1.031.953.000	30	orang	1.188.483.000	40	orang	300.000.000	60	orang	450.000.000	70	orang	600.000.000	80	orang	750.000.000	280	orang	2.278.175.000				
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang ditetapkan kapasitas tata kelolanya dengan baik	3	grup	156.530.000	3	grup	-	5	grup	120.000.000	7	grup	140.000.000	9	grup	160.000.000	10	grup	180.000.000	10	grup	600.000.000				
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Perentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah lokal Kabupaten/ Kota	33,33	33,33	%	179.460.500	33,33	%	359.845.000	50	%	380.000.000	66,667	%	425.000.000	83,33	%	470.000.000	100	%	520.000.000	100	%	2.154.845.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021-P		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
Mengembangkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Meningkatnya Budaya Berbagi yang Berkelanjutan	2.22.04.2.01.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Unit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	2	2	Kegiatan	179.460.500	2	Kegiatan	359.845.000	3	Kegiatan	380.000.000	4	Kegiatan	425.000.000	5	Kegiatan	470.000.000	6	Kegiatan	520.000.000	6	Kegiatan	2.154.845.000		
		2.22.04.2.01.01	Pembelajaran Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	100	orang	-	100	orang	-	120	orang	80.000.000	150	orang	90.000.000	170	orang	100.000.000	200	orang	110.000.000	740	orang	380.000.000			
		2.22.04.2.01.02	Pemilihan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang tersedia	1	Buah	-	1	Buah	-	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	1	Buah	200.000.000	5	Buah	800.000.000			
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses informasi sejarah	100	orang	179.460.500	100	orang	359.845.000	150	orang	100.000.000	200	orang	135.000.000	250	orang	170.000.000	300	orang	210.000.000	1000	orang	974.845.000			
		2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGOLAHAN CAGAR BUDAYA	Persepsi cagar budaya terlindungi dan terlemba dengan baik	66,7	66,7	%	254.214.000	66,7	%	322.870.000	73,33	%	1.045.000.000	80,0	%	1.240.000.000	86,67	%	1.435.000.000	100	%	1.590.000.000	100	%	5.632.870.000		
		2.22.05.2.01	Pemertanian Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota	Persepsi cagar budaya yang ditetapkan	100	100	%	61.883.000	100	%	-	83,33	%	470.000.000	69,6	%	590.000.000	70,37	%	710.000.000	66,67	%	740.000.000	66,67	%	2.510.000.000		
		2.22.05.2.01.01	Penelitian Objek Dilaga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya terungkap	15	Buah/Unit	-	15	Buah/Unit	-	18	Buah/Unit	170.000.000	23	Buah/Unit	190.000.000	27	Buah/Unit	210.000.000	30	Buah/Unit	240.000.000	30	Buah/Unit	810.000.000			
		2.22.05.2.01.02	Pemertanian Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	15	Buah/Unit	61.883.000	15	Buah/Unit	-	15	Buah/Unit	300.000.000	16	Buah/Unit	400.000.000	19	Buah/Unit	500.000.000	20	Buah/Unit	500.000.000	20	Buah/Unit	1.700.000.000			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persepsi cagar budaya yang dikelola	66,7	66,7	%	192.331.000	66,7	%	322.870.000	73,3333	%	575.000.000	80	%	650.000.000	86,67	%	725.000.000	100	%	850.000.000	100	%	3.122.870.000		
		2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	10	Buah/Unit	166.046.000	10	Buah/Unit	276.000.000	11	Buah/Unit	300.000.000	12	Buah/Unit	350.000.000	13	Buah/Unit	400.000.000	15	Buah/Unit	500.000.000	15	Buah/Unit	1.826.000.000			
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dikembangkan	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	-	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	1	Buah/Unit	200.000.000	5	Buah/Unit	800.000.000			
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	2	Buah/Unit	26.285.000	2	Buah/Unit	46.870.000	3	Buah/Unit	75.000.000	4	Buah/Unit	100.000.000	5	Buah/Unit	125.000.000	6	Buah/Unit	150.000.000	6	Buah/Unit	496.870.000			
Jumlah								123.397.218.166,94			289.734.301.114			348.183.402.416			378.752.555.430			410.050.448.932			445.606.879.227			778.465.537.916		